

Katalog: 2102050.91



Sensus
Penduduk
2020

ANALISIS TEMATIK KEPENDUDUKAN

PROVINSI PAPUA BARAT



Profil Penduduk, Migrasi, dan
Kesejahteraan Migran



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA BARAT



Sensus
Penduduk
2020

ANALISIS TEMATIK KEPENDUDUKAN

PROVINSI PAPUA BARAT



Profil Penduduk, Migrasi, dan
Kesejahteraan Migran



<https://papuabarat.bps.go.id>

Analisis Tematik Kependudukan Provinsi Papua Barat

Profil Penduduk, Migrasi dan Kesejahteraan Migran

ISBN: -

Nomor Publikasi: 91000.2324

Katalog: 2102050.91

Ukuran Buku: 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman: xii+44 halaman

Penyusun Naskah: BPS Provinsi Papua Barat

Penyunting: BPS Provinsi Papua Barat

Desain Kover: BPS Provinsi Papua Barat

Sumber Ilustrasi: www.freepik.com, doc istimewa

Dicetak Oleh: BPS Provinsi Papua Barat

Diterbitkan oleh: ©BPS Provinsi Papua Barat

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat.

Tim Penyusun

Pengarah:
Lasmuni

Penanggung Jawab:
Cltra Yanuar Widayanti

Penyunting:
Cltra Rizky Handayani

Penulis Naskah:
Rizqi Aditya Nur Hidayah

Pengolah Data:
Rizqi Aditya Nur Hidayah

Penata Letak:
Rizqi Aditya Nur Hidayah

<https://papua.go.id>

Kata Pengantar

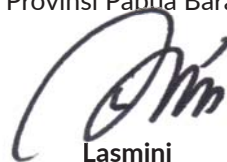
Analisis Tematik Kependudukan Provinsi Papua Barat merupakan publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat yang menyajikan analisis hasil pendataan Long Form Sensus Penduduk 2020 yang dilengkapi dengan sumber data pendukung yang relevan.

Pada buku ini akan dibahas terkait profil penduduk hasil Pendataan Long Form Sensus Penduduk 2020. Selain itu juga akan dibahas terkait Migrasi Penduduk di Provinsi Papua Barat.

Ketersediaan publikasi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna data, utamanya bagi pemerintah, dalam mendukung perumusan kebijakan bidang sosial demografi dan pembangunan manusia nasional dan provinsi.

Apresiasi dan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan publikasi ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhoi upaya kita dalam berkontribusi membangun bangsa melalui penyediaan informasi dan analisis data.

Manokwari, September 2023
Plt. Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Papua Barat



Lasmini

Daftar Isi

	Halaman
Tim Penyusun	iii
Kata	v
Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	xi
1. Profil Penduduk Provinsi Papua Barat.....	3
A. Posisi Penduduk Papua Barat di Indonesia	3
B. Karakteristik Demografi Penduduk di Provinsi Papua Barat.....	4
C. Perkembangan Jumlah Penduduk Papua Barat	10
D. Gambaran Umum Kondisi Fertilitas, Mortalitas, dan Migrasi Provinsi Papua Barat.....	10
E. Kesimpulan	14
F. Daftar Pustaka	14
2. Migrasi dan Kesejahteraan Migran.....	19
A. Migrasi : Teori dan Sejarahnya di Indonesia	19
B. Mobilitas Penduduk di Papua Barat.....	21
C. Papua Barat dan Potensinya Menjadi Wilayah Tujuan Migrasi.....	26
D. Migran dan Kesejahterannya.....	29
E. Kesimpulan	35
F. Daftar Pustaka	35
G. Lampiran	36

Daftar Tabel

Halaman

1. Profil Penduduk Provinsi Papua Barat

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (ribu jiwa), 2022	5
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan, 2022	8
Tabel 1.3	Jumlah Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Klasifikasi Wilayah, 2022	9
Tabel 1.4	Migrasi Neto Seumur Hidup Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2022	11
Tabel 1.5	Migrasi Neto Seumur Hidup Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2022	13

2. Migrasi dan Kesejahteraan Migran

Tabel 2.1	Migrasi Neto Seumur Hidup Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2022	22
Tabel 2.2	Migrasi Neto Risen Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2022 ..	23
Tabel 2.3	Migrasi Masuk Seumur Hidup, Migrasi Keluar Seumur Hidup, dan Migrasi Netto Seumur Hidup Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2022 ..	24
Tabel 2.4	Migrasi Masuk Risen, Migrasi Keluar Risen, dan Migrasi Netto Risen Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2022	25
Tabel 2.5	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2022	29

Daftar Gambar

Halaman

1. Profil Penduduk Provinsi Papua Barat

Gambar 1.1	Jumlah Penduduk di Kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Juta Jiwa). 2010 dan 2020.....	4
Gambar 1.2	Piramida Penduduk Provinsi Papua Barat, 2022.....	6
Gambar 1.3	Piramida Penduduk Provinsi Papua Barat, 2010.....	7
Gambar 1.4	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2022.....	8
Gambar 1.5	Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi Papua Barat menurut Jenis Kelamin (ribu jiwa), 2010, 2015, 2020, 2022.....	10

2. Migrasi dan Kesejahteraan Migran

Gambar 2.1	Peta Wilayah Provinsi Papua Barat.....	27
Gambar 2.2	Persentase Migran Risen menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2022.....	30
Gambar 2.3	Migran Risen Usia 15 Tahun Ke Atas menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu, 2022.....	31
Gambar 2.4	Migran Risen Usia 15 Tahun Ke Atas menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu, 2022.....	32
Gambar 2.5	Persentase Migran Risen menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal, 2022.....	33
Gambar 2.6	Persentase Migran menurut Jenis Atas, Dinding, dan Lantai Terluas Tempat Tinggal, 2022.....	34



1

Profil Penduduk Provinsi Papua Barat

- A. Posisi Penduduk Papua Barat di Indonesia
- B. Karakteristik Demografi Penduduk di Papua Barat
- C. Perkembangan Jumlah Penduduk Papua Barat
- D. Gambaran Umum Kondisi Fertilitas, Mortalitas, dan Migrasi di Papua Barat



<https://papuabarat.bp.go.id>

“

Penduduk Provinsi Papua Barat tahun 2022 mencapai 1,17 juta jiwa. Jumlah ini memposisikan Papua Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk tersedikit kedua di Indonesia, hanya di atas Provinsi Kalimantan Utara.

”

Profil Penduduk Provinsi Papua Barat

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 Ayat 2 dituliskan bahwa penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dalam Sensus Penduduk Tahun 2020 (SP2020) dan Long Form Sensus Penduduk 2020 (LF SP2020) konsep penduduk yang dimaksud adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih, ataupun mereka yang berdomisili dalam waktu kurang dari 1 tahun namun bertujuan untuk menetap.

Sensus Penduduk 2020 mencatat jumlah penduduk di Indonesia sebanyak 270,2 juta jiwa, meningkat 32,6 juta jiwa dari saat Sensus Penduduk 2010. Jumlah ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat negara-negara dengan jumlah penduduk terbanyak setelah Tiongkok (1.439 juta jiwa), India (1.380 juta jiwa), dan Amerika Serikat (331 juta jiwa). Penduduk Indonesia tersebar pada 34 provinsi dengan kepadatan yang beragam. Berdasarkan proyeksi penduduk hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020), Penduduk Indonesia tahun 2022 mencapai 275,77 juta jiwa. Ke depan, jumlah ini tentunya masih akan terus meningkat, mengingat laju pertumbuhan penduduk Indonesia tahun 2022 masih berada pada angka 1,17 persen meski diperkirakan akan terus melambat ke depannya.

Seiring bertambahnya jumlah penduduk tentu akan muncul permasalahan yang beragam tentang penduduk. Tentunya untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pengetahuan terhadap karakteristik penduduk untuk membantu dalam penentuan arah kebijakan terkait kependudukan ke depannya. Kontrol tingkat kelahiran, peningkatan sistem kesehatan untuk menurunkan tingkat kematian, dan pemerataan jumlah penduduk merupakan beberapa arah kebijakan yang perlu diperhatikan untuk mengatasi permasalahan kependudukan.

Sebagai provinsi yang terletak di bagian timur Indonesia, dengan karakteristik wilayah beragam, mulai dari gunung, pesisir, hingga kepulauan, Papua Barat juga tidak lepas dari permasalahan penduduk. Penduduk yang dominan tinggal di wilayah yang dianggap lebih maju, sehingga sebaran penduduk tidak merata, juga beragamnya medan hingga mempersulit pemerataan fasilitas umum dan kesehatan menjadi dua hal yang penting disorot.

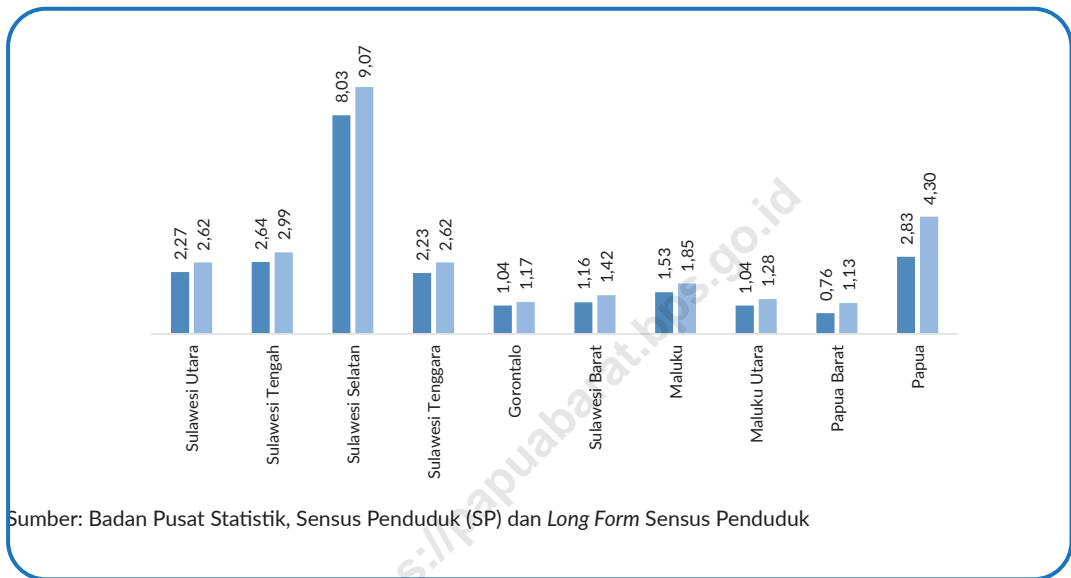
A. Posisi Penduduk Papua Barat di Indonesia

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Provinsi Papua Barat 760.422 jiwa dengan rincian 402.398 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 358.024 jiwa berjenis kelamin perempuan. Pada tahun 2010, jumlah penduduk Provinsi Papua Barat menempati posisi ke-33 dari total 33 provinsi di Indonesia, dengan total 0,32 persen dibanding total penduduk Indonesia.

Jika dibandingkan, jumlah penduduk di Provinsi Papua Barat berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 mengalami kenaikan dari tahun 2010 sebanyak 373,65 jiwa menjadi berjumlah sebanyak 1,1 juta jiwa atau setara 0,42 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Pertumbuhan penduduk Provinsi Papua Barat selama periode tahun 2010-2020 berkisar pada 3,94 persen pertahun. Jumlah ini menempatkan Provinsi Papua Barat pada urutan ke-33 dari 34 provinsi di Indonesia. Jumlah penduduk Provinsi Papua Barat hanya berada di atas

Provinsi Kalimantan Utara, yang merupakan provinsi yang terakhir terbentuk dengan jumlah penduduk berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP2020) hanya sebesar 0,7 juta jiwa atau 0,26 persen penduduk Indonesia. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk lain di provinsi yang berada di kawasan Sulampua (Sulawesi, Maluku, dan Papua), jumlah penduduk di Provinsi Papua Barat merupakan yang terendah. Adapun jumlah penduduk masing-masing wilayah lebih lengkap dapat dilihat pada gambar 1.1

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk di Kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Juta Jiwa). 2010 dan 2020



B. Karakteristik Demografi Penduduk di Provinsi Papua Barat

Untuk dapat mengetahui lebih jauh terkait kondisi penduduk lebih jauh, tentunya penting untuk mengetahui karakteristik demografi penduduknya. Karakteristik demografi yang umum dibahas adalah yang berkaitan dengan jenis kelamin, dan kelompok umur penduduk.

B.1. Penduduk Papua Barat menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020), jumlah penduduk Provinsi Papua Barat tahun 2022 mencapai 1,17 juta jiwa, dengan rincian 613,29 ribu jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 555,13 ribu jiwa penduduk berjenis kelamin perempuan. Adapun Rasio Jenis Kelamin penduduk Provinsi Papua Barat tahun 2022 adalah 111,47 atau dapat diartikan bahwa untuk setiap 100 penduduk perempuan, terdapat 110 hingga 111 penduduk laki-laki.

Jika dilihat berdasarkan sebaran penduduk di kabupaten/kota, wilayah dengan penduduk terbanyak adalah Kota Sorong dengan jumlah penduduk tahun 2022 hasil proyeksi mencapai 291,15 ribu jiwa. Jumlah ini mencapai 24,92 persen dari total penduduk Provinsi Papua Barat. Wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak kedua adalah Kabupaten Manokwari dengan jumlah penduduk mencapai 198,67 ribu jiwa atau 17,00 persen dari total penduduk Provinsi Papua Barat. Adapun wilayah dengan jumlah penduduk terendah adalah Kabupaten Tambrau dengan 29,84 ribu jiwa, dan Kabupaten Manokwari Selatan dengan 37,28 ribu

jiwa.

Untuk proporsi penduduk menurut jenis kelamin pada masing-masing kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua Barat secara umum tidak berbeda jauh dengan gambaran kondisi penduduk provinsi, yang mana masih didominasi penduduk berjenis kelamin laki-laki, atau rasio jenis kelaminnya berada di atas 100. Adapun wilayah dengan rasio jenis kelamin penduduk tertinggi Kabupaten Teluk Bintuni dengan 137,47, dan wilayah dengan rasio jenis kelamin penduduk terendah atau wilayah dengan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan mendekati sama adalah Kabupaten Maybrat dengan rasio jenis kelamin 101,88.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (ribu jiwa), 2022

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Fakfak	44,75	42,84	87,59
Kaimana	33,60	30,74	64,33
Teluk Wondama	22,90	20,60	43,49
Teluk Bintuni	51,58	37,52	89,11
Manokwari	103,00	95,67	198,67
Sorong Selatan	28,24	26,03	54,26
Sorong	63,55	57,32	120,88
Raja Ampat	35,23	31,68	66,91
Tambrau	15,48	14,36	29,84
Maybrat	22,74	22,32	45,06
Manokwari Selatan	19,22	18,06	37,28
Pegunungan Arfak	20,22	19,63	39,85
Kota Sorong	152,77	138,38	291,15
Papua Barat	613,29	555,13	1 168,42

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk (SP) dan Long Form Sensus Penduduk

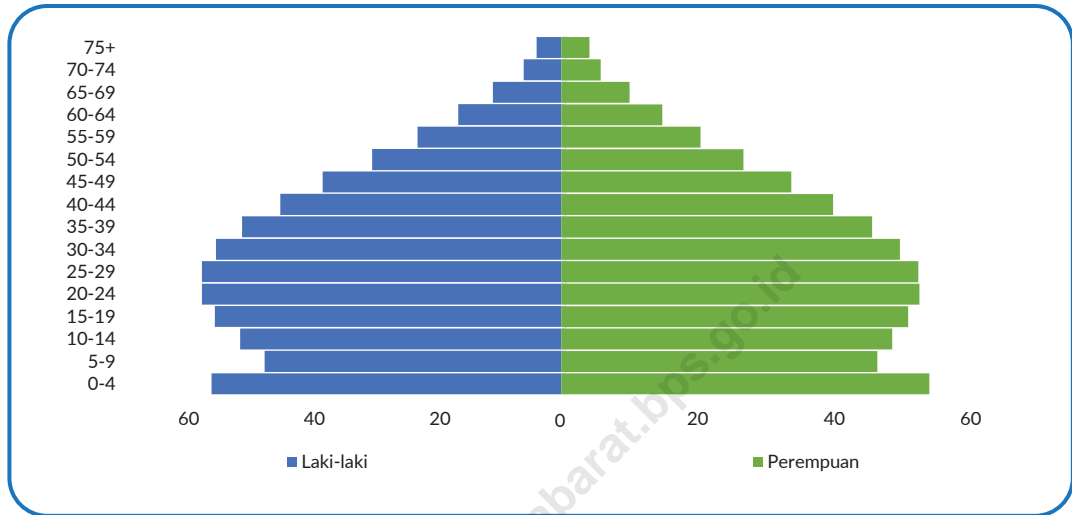
B.2. Penduduk Papua Barat menurut Kelompok Umur

Selain berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur juga dapat digunakan untuk melihat karakteristik demografi penduduk suatu wilayah yang tergambar pada piramida penduduk suatu wilayah. Piramida penduduk Provinsi Papua Barat pada tahun 2022 menunjukkan bentuk genta atau lonceng terbalik dengan frekuensi jumlah penduduk tertinggi ada pada kelompok usia produktif, terutama pada kelompok umur 20-24 tahun. Hal ini menjadi indikasi bahwa Provinsi Papua Barat telah mulai masuk pada era menikmati bonus demografi. Secara teori, semakin banyaknya jumlah penduduk usia produktif, tentu akan semakin baik juga produktifitas wilayah tersebut, yang berkaitan juga dengan kondisi ekonomi yang semakin baik.

Meski secara umum didominasi penduduk usia produktif, frekuensi jumlah penduduk kelompok umur 0-4 tahun masih cukup banyak, namun memasuki kelompok umur 5-9 tahun


jumlahnya mulai menurun, dan lebih sedikit dibanding frekuensi penduduk di kelompok usia produktif. Tentunya hal ini menjadi penting dalam perencanaan kebijakan pemerintah di masa mendatang mengingat penduduk usia anak ini yang akan mengisi ruang penduduk usia produktif dalam beberapa waktu ke depan.

Gambar 1.2 Piramida Penduduk Provinsi Papua Barat, 2022

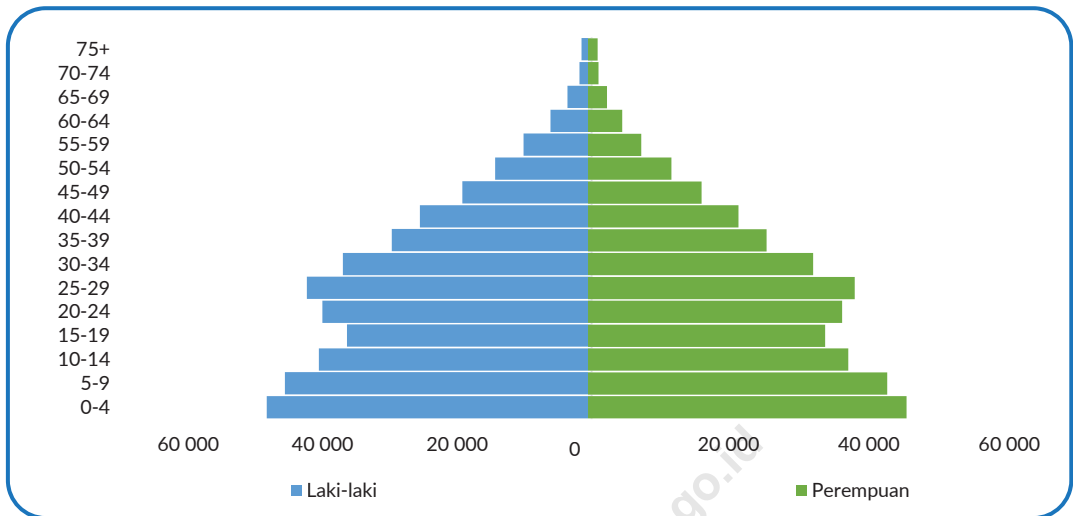


Catatan: Jumlah Penduduk dalam ribu jiwa
Sumber: Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk (SP) dan Long Form Sensus Penduduk

Berbeda dengan kondisi tahun 2022, pada tahun 2010, piramida penduduk Provinsi Papua Barat berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010, kondisi piramida penduduknya masih didominasi penduduk usia anak. Meski pada tahun tersebut, bagian piramida penduduk usia produktif sudah mulai terlihat menonjol, namun jika dilihat pada masing-masing kelompok umurnya, masih belum ada yang melewati bagian piramida untuk penduduk usia anak atau dengan kata lain kondisi piramida penduduknya adalah ekspansif menuju stasioner. Tentunya pada kondisi piramida penduduk berbentuk ekspansif, kebijakan yang berkaitan dengan kependudukan akan diarahkan berkaitan dengan pengendalian jumlah penduduk, untuk menghindari ledakan penduduk usia anak. Hal-hal seperti program Keluarga Berencana (KB), pengawasan dan tindakan preventif berkaitan dengan pernikahan anak, menjadi pilihan dari beberapa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

 Piramida penduduk Papua Barat yang pada tahun 2010 adalah piramida ekspansif, sudah mulai berubah menuju piramida stasioner pada tahun 2022.

Gambar 1.3 Piramida Penduduk Provinsi Papua Barat, 2010



Sumber: Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk

Tentunya untuk tahun-tahun ke depan, program pengendalian jumlah penduduk seperti pembatasan dan penjarakkan kelahiran yang diterapkan pemerintah sejak sebelum tahun 2010, tidak lagi menjadi relevan untuk diterapkan mengingat jumlah penduduk usia anak sudah mulai menurun. Tentunya program ini perlu diarahkan menjadi pengendalian jumlah penduduk yang ditujukan untuk menjaga angka pertumbuhan penduduk tidak berubah arah menjadi negatif, dan memastikan potensi penduduk usia anak dapat dikembangkan secara lebih maksimal agar tujuan Indonesia Emas 2045 dapat tercapai.

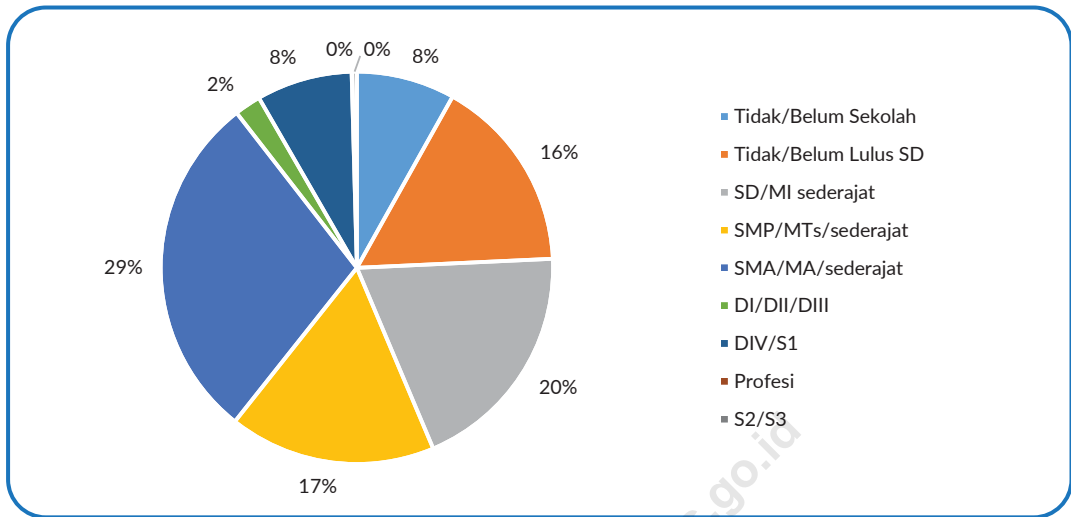
B.3. Penduduk Papua Barat menurut Tingkat Pendidikan

Indonesia Emas 2045 merupakan visi Indonesia yang diharapkan oleh pemimpin negeri ini untuk dapat diraih bersamaan dengan peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Adapun 4 pilar visi Indonesia Emas 2045 mencakup 1. Pembangunan Manusia dan Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 2. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan; 3. Pemerataan Pembangunan; 4. Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan.

Pendidikan menjadi salah satu poin penting yang perlu diperhatikan karena terkandung dalam pilar visi pertama Indonesia Emas 2045 yaitu pilar Pembangunan Manusia dan Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Untuk dapat mencapai target yang telah ditentukan terkait perkembangan arah ilmu pengetahuan, tentu penting untuk mengetahui kondisi awal tingkat pendidikan agar dapat ditentukan kebijakan yang tepat arah agar target tersebut dapat tercapai tepat waktu.

Tingkat pendidikan penduduk usia 5 tahun ke atas di Papua Barat masih belum cukup baik, karena masih didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan di bawah SMA/ sederajat. Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas dengan pendidikan tertinggi SMP ke bawah mencapai lebih dari 60 persen dari total populasi. Bahkan persentase penduduk yang tidak menamatkan tingkat pendidikan hingga minimal SMP/ sederajat mencapai 4 persen. Adapun tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk usia 5 tahun ke atas masih didominasi tingkat SMA/ sederajat dengan 29 persen.

Gambar 1.4 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk (SP) dan Long Form Sensus Penduduk

Tingginya persentase penduduk dengan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan kurang dari SMA/ sederajat, perlu menjadi evaluasi bagi berbagai pihak mengingat pendidikan memegang peranan penting dalam kehidupan. Kampanye program pendukung pendidikan seperti, pendidikan minimal 9 tahun atau setara dengan menamatkan SMP/ sederajat dan sekolah paket perlu kembali diramaikan. Hal ini sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan, 2022

Kabupaten/Kota	Jenjang Pendidikan		
	Tidak/Belum Pernah Bersekolah	SMP/ sederajat ke bawah	SMA/ sederajat - S3
(1)	(2)	(3)	(4)
Fakfak	5,81	59,71	34,48
Kaimana	6,91	59,45	33,64
Teluk Wondama	7,43	67,29	25,28
Teluk Bintuni	7,93	60,34	31,73
Manokwari	10,32	52,13	37,55
Sorong Selatan	8,19	61,16	30,65
Sorong	8,73	57,60	33,67
Raja Ampat	5,19	62,47	32,34
Tambrau	14,94	53,28	31,78
Maybrat	7,38	47,45	45,17
Manokwari Selatan	16,11	50,91	32,97
Pegunungan Arfak	28,15	46,66	25,19
Kota Sorong	3,57	40,74	55,69

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk (SP) dan Long Form Sensus Penduduk

Pada hampir semua kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat, kondisinya serupa dengan kondisi provinsi secara keseluruhan termasuk dengan Kabupaten Sorong dan Kabupaten Manokwari yang dianggap lebih maju dari wilayah lain, juga kondisinya serupa dengan wilayah lainnya. Wilayah Kota Sorong merupakan satu-satunya wilayah di Provinsi Papua Barat yang persentase pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk usia 5 tahun ke atas didominasi oleh tingkat pendidikan SMA/ sederajat ke atas.

B.4. Jumlah Rumah Tangga di Papua Barat

Selain konsep keluarga, Badan Pusat Statistik juga mengenal konsep Rumah Tangga. Konsep Rumah Tangga yang digunakan oleh BPS adalah merupakan seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan dan biasanya tinggal bersama serta makan bersama dari satu dapur. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu.

Tabel 1.3 Jumlah Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Klasifikasi Wilayah, 2022

Kabupaten/Kota	Klasifikasi Wilayah		
	Daerah Perkotaan	Daerah Perdesaan	Gabungan
(1)	(2)	(3)	(4)
Fakfak	7 020	11 357	18 377
Kaimana	7 563	6 843	14 406
Teluk Wondama	1 438	8 502	9 940
Teluk Bintuni	6 402	14 007	20 409
Manokwari	12 080	32 376	44 456
Sorong Selatan	1 959	8 733	10 692
Sorong	5 852	22 974	28 826
Raja Ampat	4 945	9 882	14 827
Tambrauw	466	7 046	7 512
Maybrat	34	8 711	8 745
Manokwari Selatan	2 745	6 127	8 872
Pegunungan Arfak	-	8 940	8 940
Kota Sorong	62 605	3 082	65 687
Papua Barat	113 109	148 580	261 689

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk (SP) dan Long Form Sensus Penduduk

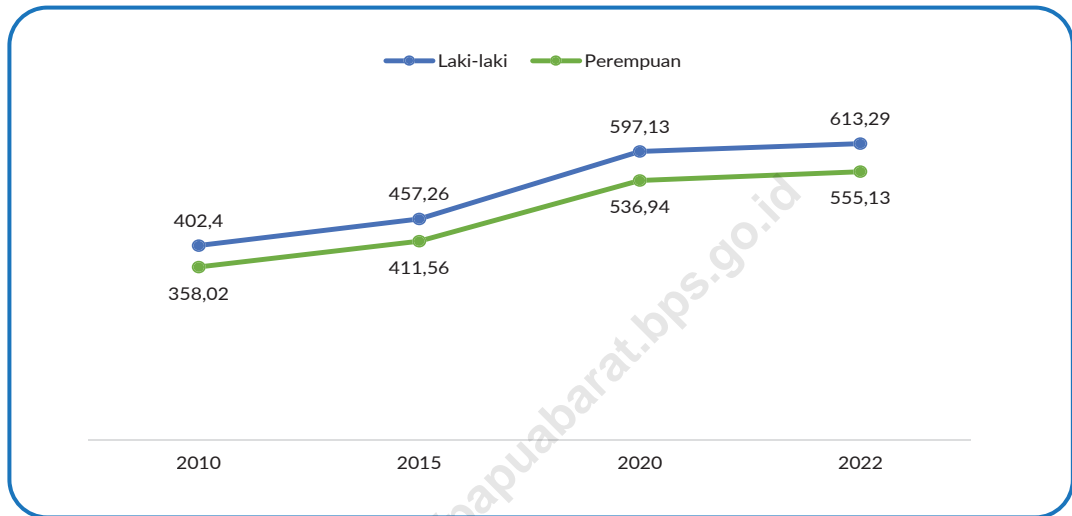
Di Provinsi Papua Barat, jumlah rumah tangga yang tinggal di wilayah perdesaan masih jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang tinggal di wilayah perkotaan. Hal ini disebabkan salah satunya adalah sebagian besar wilayah di Papua Barat masih berbentuk desa dan masuk dalam klasifikasi perdesaan. Jumlah wilayah yang masuk dalam klasifikasi perdesaan di Papua Barat menurut hasil Pendataan Potensi Desa tahun 2021 mencapai 1.891 desa dari total 1.986 desa/kelurahan di Papua Barat. Wilayah dengan jumlah rumah tangga yang tinggal di wilayah perkotaan lebih banyak dibanding perdesaan hanya terjadi di wilayah Kota Sorong.

Wilayah dengan jumlah rumah tangga terbanyak adalah Kota Sorong dengan 65.687 rumah tangga. Hal ini selaras dengan jumlah penduduk Kota Sorong yang juga terbanyak di Papua Barat. Adapaun wilayah dengan jumlah rumah tangga tersedikit adalah Kabupaten Tambrauw dengan 7.512 rumah tangga.

C. Perkembangan Jumlah Penduduk Papua Barat

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya jumlah penduduk Provinsi Papua Barat tahun 2022 mencapai 1,17 juta jiwa, dengan rincian 613,29 ribu jiwa penduduk laki-laki dan 555,13 ribu jiwa penduduk perempuan. Jumlah ini telah meningkat 55,6 persen disbanding kondisi tahun 2010 yang hanya mencapai 760 422 jiwa. Perkembangan penduduk ini tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor meliputi kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk .

Gambar 1.5 Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi Papua Barat menurut Jenis Kelamin (ribu jiwa), 2010, 2015, 2020, 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk dan *Long Form* Sensus Penduduk

Perkembangan jumlah penduduk Provinsi Papua Barat dari waktu ke waktu cenderung sejalan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Hal ini terlihat dari grafik perkembangan penduduk yang searah. Pada grafik juga terlihat bahwa baik pada tahun 2010, hingga tahun 2022, proporsi penduduk laki-laki di Papua Barat jauh lebih besar dibandingkan penduduk perempuan.

D. Gambaran Umum Kondisi Fertilitas, Mortalitas, dan Migrasi Provinsi Papua Barat

Perkembangan jumlah penduduk dari waktu ke waktu dipengaruhi beberapa faktor mencakup Fertilitas atau kelahiran yang menambah jumlah penduduk, mortalitas atau kematian yang menjadi faktor pengurang jumlah penduduk, dan migrasi penduduk antar wilayah. Migrasi penduduk sendiri secara sederhana terbagi menjadi migrasi masuk dan migrasi keluar. Sebuah contoh kasus, terdapat seorang yang sebelumnya tinggal dan menetap di suatu wilayah lalu memutuskan untuk pindah ke tempat lain. Untuk wilayah yang menjadi tujuan orang tersebut, dia dikatakan sebagai migran masuk atau orang yang melakukan migrasi masuk, sedangkan untuk wilayah yang ditinggalkannya atau wilayah tempat tinggal lamanya, dia dikatakan sebagai migran keluar atau orang yang melakukan migrasi keluar dari suatu wilayah.

D.1. Fertilitas Penduduk

Membahas jumlah penduduk tentu tidak lepas dengan penambahan jumlah penduduk oleh kelahiran. Terdapat dua indikator kelahiran/fertilitas yang umum digunakan oleh BPS dalam mengukur tingkat kelahiran suatu wilayah yaitu indikator Angka Kelahiran Total atau *Total Fertility Rate* (TFR) dan Angka Kelahiran Kasar atau *Crude Birth Rate* (CBR). TFR sendiri adalah Angka kelahiran total merupakan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seorang perempuan selama masa usia suburnya. Sementara CBR adalah Angka Kelahiran Kasar (CBR) merupakan ukuran fertilitas yang sangat kasar karena penduduk terpapar yang digunakan sebagai penyebut adalah penduduk dari semua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) dan semua umur (anak-anak dan orang tua) yang tidak mempunyai potensi untuk melahirkan. CBR merupakan jumlah kelahiran per 1000 orang di dalam suatu jumlah penduduk tertentu. Berdasarkan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020,

Tabel 1.4 Migrasi Neto Seumur Hidup Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2022

Kabupaten/Kota	Indikator Fertilitas	
	TFR	CBR
(1)	(2)	(3)
Fakfak	2,47	19,96
Kaimana	2,84	23,36
Teluk Wondama	4,05	32,35
Teluk Bintuni	2,48	19,07
Manokwari	2,29	19,84
Sorong Selatan	3,24	26,71
Sorong	2,48	20,37
Raja Ampat	3,60	29,41
Tambrauw	4,08	38,78
Maybrat	3,49	33,95
Manokwari Selatan	2,62	24,22
Pegunungan Arfak	2,85	24,22
Kota Sorong	2,20	19,07
Papua Barat	2,66	22,84

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk (SP) dan Long Form Sensus Penduduk

Angka Kelahiran Total (TFR) Provinsi Papua Barat pada tahun 2022 mencapai 2,66, atau rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh perempuan selama usia suburnya adalah 2 hingga 3 anak. Sementara Angka Kelahiran Kasar (CBR) Papua Barat adalah sebesar 22,84 atau jumlah kelahiran per 1000 penduduk di Papua Barat adalah 22 hingga 23 kelahiran.

Adapun kabupaten/kota dengan TFR tertinggi adalah Kabupaten Tambrauw dengan 4,08, dan terendah adalah Kota Sorong dengan 2,20. Angka TFR ini sejalan dengan angka CBR kabupaten/kota di mana Kabupaten dengan Angka CBR tertinggi adalah Kabupaten Tambrauw dengan 38,78 dan terendah adalah Kota Sorong dengan 19,07.

D.2. Mortalitas Penduduk

Kebalikan dari kelahiran atau fertilitas adalah kematian atau mortalitas. Tidak dapat dipungkiri bahwa kematian lekat dengan kehidupan baik karena sakit ataupun faktor lainnya, seperti kecelakaan. Dalam mengidentifikasi mortalitas di suatu wilayah, BPS menggunakan beberapa indikator perhitungan, meliputi :

1. Angka Kematian Bayi (AKB)/*Infant Mortality Rate* (IMR), Kematian bayi didefinisikan sebagai banyaknya kematian bayi usia di bawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Selain mencerminkan besarnya masalah kesehatan yang berhubungan langsung dengan kematian bayi, indikator AKB juga mencerminkan kesehatan ibu dan lingkungan tempat tinggal bayi tersebut.
2. Angka Kematian Anak (AKABA)/*Child Mortality Rate* (CMR), Angka Kematian Anak adalah jumlah kematian penduduk umur 1-4 tahun pada tahun tertentu per 1000 kelahiran hidup.
3. Angka Kematian Balita (AKBa)/*Under-Five Mortality Rate* (USMR), Angka Kematian Balita adalah jumlah kematian penduduk umur 0-4 tahun pada tahun tertentu per 1000 kelahiran hidup.
4. Angka Kematian Kasar atau *Crude Death Rate* (CDR), Angka Kematian Kasar adalah banyaknya kematian pada suatu tahun tertentu per 1.000 penduduk. Angka Kematian Kasar dapat memberikan gambaran mengenai keadaan kesejahteraan penduduk pada suatu tahun yang bersangkutan. Namun, indikator ini masih sangat kasar karena tidak memperhitungkan struktur umur, dimana setiap kelompok umur memiliki tingkat risiko kematian yang berbeda.
5. Angka Kematian Ibu (AKI) atau *Maternal Mortality Rate* (MMR), Angka Kematian Ibu (AKI) adalah jumlah kematian maternal selama periode waktu tertentu per 100.000 kelahiran hidup pada periode yang sama. Menurut ICD-10, kematian maternal adalah kematian perempuan mulai dari masa kehamilan hingga 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilan atau penanganannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup.

Berdasarkan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020, Angka Kematian Anak di Papua Barat mencapai 10,17. Hal ini dapat diartikan bahwa kematian Anak dan Kematian Balita di Papua Barat secara berturut-turut adalah 10 hingga 11 kasus per 1000 kelahiran hidup. Sementara Angka Kematian Balita (AKBa) mencapai 47,23 yang artinya terdapat 47 hingga 48 kasus kematian anak usia di bawah 5 tahun per 1000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Papua Barat pada tahun 2022 mencapai 343 atau terdapat 3 hingga 4 kasus kematian maternal ibu per 1000 kelahiran hidup. Angka ini menjadikan Papua Barat wilayah dengan AKI tertinggi kedua setelah Provinsi Papua yang memiliki AKI mencapai 565.

Masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Balita di Provinsi Papua Barat nampaknya perlu menjadi perhatian. Tingginya angka kematian Ibu dan Balita berkorelasi dengan banyak faktor kesehatan seperti kondisi sanitasi, pemenuhan gizi Ibu dan Balita, ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang merata di seluruh wilayah dengan akses yang mudah.

D.3. Migrasi Penduduk

Selain faktor alami seperti fertilitas dan mortalitas, terdapat juga faktor eksternal yang mempengaruhi jumlah penduduk suatu wilayah yaitu perpindahan penduduk, baik masuknya penduduk dari luar wilayah, maupun keluarnya penduduk dari suatu wilayah. Dalam kondisi masih terdapat kesenjangan di berbagai wilayah, perpindahan penduduk atau disebut migrasi

merupakan hal yang sangat mungkin terjadi

Migrasi dalam sejarahnya di Indonesia sudah terjadi bahkan sebelum Indonesia merdeka. Gelombang besar arus migrasi masuk ke Nusantara pertama terjadi pada sekitar tahun 2500 SM dari Semenanjung Yunan, Tiongkok Selatan (Setiawan, 2019). Awalnya migrasi dari luar wilayah bertujuan mencari tempat tinggal yang lebih cocok, lalu bergeser kepada tujuan perdagangan, hingga berakhir dengan eksploitasi sumber daya yang dilakukan oleh Kerajaan Belanda melalui serikat dagang mereka.

Seiring berkembangnya waktu, proses migrasi yang terjadi di Indonesia tidak sebatas pada warga negara asing masuk dan menetap ke Indonesia saja. Migrasi antar wilayah di Indonesia juga terjadi, bahkan menjadi bagian kebijakan pemerintah untuk pemerataan penduduk dan kesejahteraan. Migrasi yang digagas oleh pemerintah Indonesia sendiri ini kemudian disebut dengan Transmigrasi.

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Papua, selama dilaksanakannya program transmigrasi di tanah Papua yang telah berlangsung sejak tahun 1964 sampai 1999, diketahui terdapat 78 000 KK transmigran yang masuk ke Pulau Papua (mencakup wilayah yang kemudian menjadi Provinsi Papua dan Papua Barat). Namun, pasca diberlakukan UU Otsus No 21 Tahun 2001, program transmigrasi sementara terhenti.

Tabel 1.5 Migrasi Neto Seumur Hidup Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2022

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Fakfak	3 951	4 049	8 000
Kaimana	7 615	6 810	14 425
Teluk Wondama	3 494	2 824	6 319
Teluk Bintuni	17 784	10 052	27 837
Manokwari	24 979	24 033	49 012
Sorong Selatan	-610	-125	-733
Sorong	6 072	5 531	11 603
Raja Ampat	7 747	6 062	13 809
Tambrauw	1 033	1 076	2 108
Maybrat	-681	-34	-715
Manokwari Selatan	5 228	4 634	9 862
Pegunungan Arfak	-1 369	-1 114	-2 482
Kota Sorong	54 162	29 477	103 639
Papua Barat	129 406	113 277	242 683

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk (SP) dan Long Form Sensus Penduduk

Berdasarkan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020, angka migrasi neto Provinsi Papua Barat adalah 242 683 jiwa. Atau ada tambahan 242 683 jiwa penduduk yang tempat lahirnya berada di luar wilayah Provinsi Papua Barat, dan penduduk tersebut saat ini berdomisili di Papua Barat. Angka ini cukup signifikan karena mencapai 20,5 persen dari total seluruh penduduk di Provinsi Papua Barat.

Berdasarkan data pada tabel tersebut terlihat bahwa wilayah dengan angka migrasi neto terbesar adalah Kota Sorong, disusul oleh Kabupaten Manokwari, dan Kabupaten Teluk Bintuni. Pada wilayah tersebut, dapat dinyatakan bahwa penambahan jumlah penduduk dipengaruhi oleh pendatang dari wilayah lain. Sedangkan beberapa wilayah yang memiliki angka migrasi neto negatif seperti Kabupaten Sorong Selatan, Maybrat, dan Pegunungan Arfak, dapat dikatakan bahwa migrasi keluar seumur hidup yang lebih banyak dibandingkan migrasi masuk seumur hidup menyebabkan angka migrasi menjadi pengurang jumlah penduduk.

E. Kesimpulan

Penduduk Provinsi Papua Barat tahun 2022 hasil proyeksi penduduk adalah berjumlah 1,17 juta jiwa, dengan rincian 613,29 ribu jiwa penduduk laki-laki dan 555,13 ribu jiwa penduduk perempuan. Jumlah ini telah meningkat 55,6 persen dibanding kondisi tahun 2010 yang hanya mencapai 760 422 jiwa.

Berdasarkan hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020, Angka Kelahiran Total (TFR) Provinsi Papua Barat pada tahun 2022 mencapai 2,66, atau rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh perempuan selama usia subur adalah 2 hingga 3 anak. Sementara Angka Kelahiran Kasar (CBR) Papua Barat adalah sebesar 22,84 atau jumlah kelahiran per 1000 penduduk di Papua Barat adalah 22 hingga 23 kelahiran.

Angka Kematian Anak di Papua Barat mencapai 10,17, dengan Angka Kematian Balita mencapai 47,23. Hal ini dapat diartikan bahwa kematian Anak dan Kematian Balita di Papua Barat secara berturut-turut adalah 10 hingga 11 kasus per 1000 kelahiran hidup, dan 47 hingga 48 kasus per 1000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu di Provinsi Papua Barat pada tahun 2022 mencapai 37,06 atau terdapat 37 hingga 38 kasus kematian perempuan selama masa kehamilan hingga selesai masa nifas per 100.000 kelahiran hidup.

Angka migrasi neto Provinsi Papua Barat adalah 242.683 jiwa atau terdapat tambahan 242.683 jiwa penduduk yang tempat lahirnya berada di luar wilayah Provinsi Papua Barat, dan penduduk tersebut saat ini berdomisili di Papua Barat. Angka ini cukup signifikan karena mencapai 20,5 persen dari total seluruh penduduk di Provinsi Papua Barat.

Berdasarkan indikator yang ada, perkembangan jumlah penduduk di Provinsi Papua Barat utamanya ditunjang oleh tingginya angka migrasi masuk penduduk dari wilayah lain ke Provinsi Papua Barat.

F. Daftar Pustaka

- Bappenas. (2019). Ringkasan Eksekutif Visi Indonesia 2045. Jakarta: Bappenas.
- BPS. (2010). Modul 3 Mortalitas. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2012). Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 2010. Jakarta: BPS.
- BPS. (2023a). Retrieve from <https://www.bps.go.id/indicator/12/1976/1/laju-pertumbuhan-penduduk.html> diakses pada Selasa, 21 Agustus 2023
- BPS. (2023b). Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 (Publikasi). Jakarta: BPS.
- BPS. (2023c). Hasil olah data Long Form Sensus Penduduk 2020 (Tabel). Jakarta: BPS
- BPS Provinsi Papua Barat. (2022). Statistik Potensi Desa Provinsi Papua Barat 2021. Manokwari: BPS Provinsi Papua Barat.
- BPS Provinsi Papua Barat. (2023a). Retrieve from <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/>

jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html diakses pada Selasa, 21 Agustus 2023.
BPS Provinsi Papua Barat. (2023b). Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020; Manokwari: BPS Provinsi Papua Barat
BPS Provinsi Papua Barat. (2023c). Penduduk Papua Barat Hasil Long Form Sensus 2020. Manokwari: BPS Provinsi Papua Barat.
World Health Organization. (2012). The WHO Application of ICD-10 to deaths during pregnancy, childbirth and the puerperium : ICD-MM.

<https://papuabarat.bps.go.id>

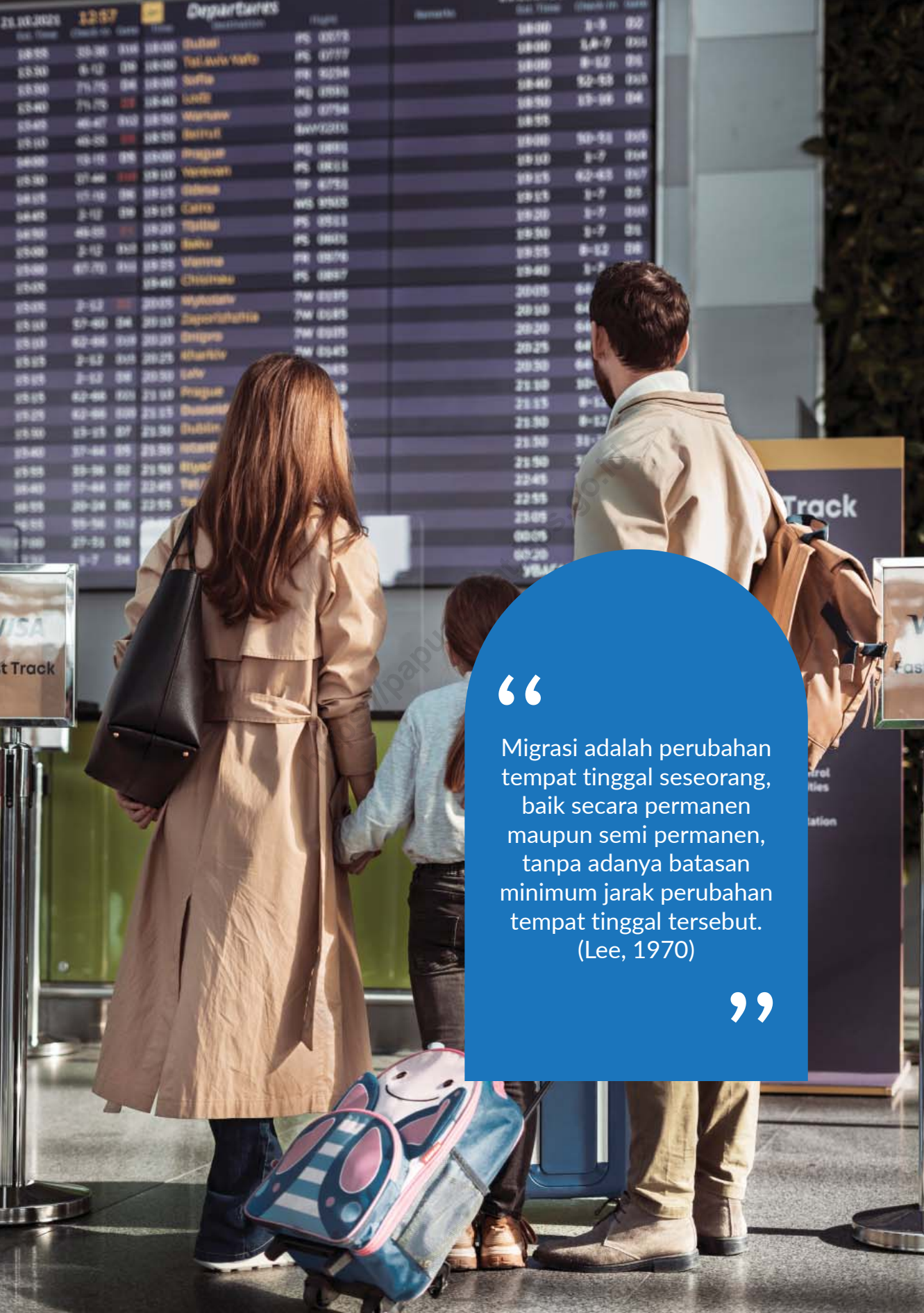




2

Migrasi dan Kesejahteraan Migran

- A. Migrasi : Teori Dasar dan Sejarahnya di Indonesia
- B. Mobilitas Penduduk di Provinsi Papua Barat
- C. Papua Barat dan Potensinya Menjadi Wilayah Tujuan Migrasi
- D. Migran dan Kesejahteraan



“

Migrasi adalah perubahan tempat tinggal seseorang, baik secara permanen maupun semi permanen, tanpa adanya batasan minimum jarak perubahan tempat tinggal tersebut. (Lee, 1970)

”

Migrasi dan Kesejahteraan Migran

A. Migrasi : Teori dan Sejarahnya di Indonesia

Migrasi (*Migration*) dari segi etimologi berasal dari Bahasa Latin *migratio* yang berarti perpindahan penduduk antarnegara. Menurut Lee (1970), Migrasi dapat diartikan sebagai perubahan tempat tinggal seseorang, baik secara permanen maupun semi permanen, tanpa adanya batasan tentang minimum jarak perubahan tempat tinggal tersebut.

A.1. Teori Dasar Migrasi dan Hubungannya dengan Perekonomian Penduduk

Salah satu teori migrasi yang terkenal adalah teori migrasi adalah teori *Push and Pull* yang dikemukakan Ravenstein. Teori ini menjelaskan bahwa terdapat faktor pendorong (*Push Factors*) dan faktor penarik (*pull factors*) yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk bermigrasi. Faktor pendorong merupakan faktor yang mendorong seseorang untuk meninggalkan tempat tinggal sebelumnya yang muncul akibat tekanan ekonomi atau sosial yang membuat seseorang merasa tidak nyaman atau tidak aman di tempat asal mereka.. Contoh faktor pendorong adalah bencana alam, perang atau konflik, ketidakstabilan kondisi politik, lalu faktor kesejahteraan seperti kemiskinan dan pengangguran. Sedangkan faktor penarik seseorang untuk pindah menuju tempat baru antara lain adalah peluang lapangan pekerjaan yang lebih luas dan lebih baik, faktor keamanan lingkungan dan politik, serta kondisi lingkungan dan fasilitas penunjang kualitas hidup yang lebih baik seperti sekolah, fasilitas kesehatan, dll (Ravenstein,1985). Teori ini yang kemudian dikembangkan oleh beberapa pakar lainnya untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang melakukan migrasi.

Mantra menjelaskan terdapat teori yang mengatakan bahwa alasan seseorang mengambil keputusan untuk melakukan migrasi salah satunya berkaitan dengan teori kebutuhan dan stres (*needs and stress*). Dalam teori ini dijelaskan bahwa setiap individu mempunyai kebutuhan yang perlu dipenuhi. Kebutuhan yang dimaksud dapat berupa kebutuhan ekonomi, sosial, politik, maupun secara psikologi. Apabila kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi maka munculah stres (Mantra, 2008).

Tingkatan stres yang dialami oleh seorang individu berbanding terbalik dengan kemampuannya dalam melakukan pemenuhan kebutuhannya. Selama tingkat stres yang dialami seseorang tidak terlalu besar atau masih dalam batas toleransinya, maka orang tersebut tidak akan pindah dan tetap tinggal di daerah asal tentunya dengan menyesuaikan antara kembali antara kemampuan lingkungan dalam memenuhi kebutuhannya. Namun saat stres yang dialami seseorang melewati batas toleransinya, maka orang tersebut akan mulai mempertimbangkan untuk pindah ke daerah lain yang dapat memenuhi kebutuhannya. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang akan melakukan perpindahan atau mobilisasi dari daerah yang mempunyai nilai kefaedahan wilayah (*place utility*) lebih rendah ke daerah yang mempunyai nilai kefaedahan wilayah yang lebih tinggi dimana kebutuhannya dapat terpenuhi.

Teori migrasi lainnya tidak terlalu jauh berbeda dengan teori yang dikemukakan Ravenstein dan Mantra yang menyatakan bahwa terdapat kecenderungan bahwa diperlukan faktor eksternal pada batasan tertentu untuk membuat seseorang memutuskan melakukan migrasi. Salah satu faktor kuat yang ingin dibahas lebih jauh adalah faktor ekonomi dan hubungannya

dengan alasan seseorang melakukan migrasi. Faktor ekonomi ini berkaitan dengan beberapa faktor seperti potensi perekonomian suatu wilayah dan kemungkinan memperoleh lapangan pekerjaan.

Dalam realitasnya, hubungan migrasi dan perekonomian tidak berjalan searah dimana kondisi perekonomian mempengaruhi migrasi, melainkan keduanya saling mempengaruhi. Contohnya, migrasi dipicu oleh ketidakediaan lapangan pekerjaan yang cukup di suatu wilayah. Namun dengan tingginya angka migrasi ke luar dari wilayah tersebut, secara langsung berpengaruh pada jumlah angkatan kerja di suatu wilayah. Apabila perekonomian di wilayah yang ditinggalkan ini kemudian berkembang, tentunya akan muncul kesulitan memperoleh angkatan kerja yang potensial untuk mengisi lapangan kerja yang tersedia.

Salah satu penelitian yang menjelaskan hubungan dua arah antara perekonomian dan migrasi adalah penelitian yang dilakukan oleh Swasono (1985) di Aceh, diketahui bahwa kehadiran transmigran secara tidak langsung telah menghidupkan perekonomian, terutama di daerah pedesaan. Kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi pada lokasi penempatan transmigran terutama di daerah pedesaan, karena pedesaan menjadi sasaran utama penempatan transmigrasi. Selain itu wilayah pedesaan juga memberi ruang yang luas dalam mendukung pengembangan kegiatan pertanian dan pemukiman transmigran. Pertanian menjadi kegiatan utama para migran yang pertama datang di daerah transmigrasi.

A.2. Migrasi di Indonesia dalam Catatan Sejarah dan Budaya

Secara demografi Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk berada pada posisi keempat di dunia. Jumlah dan pertumbuhan tentu tidak lepas dari pengaruh aspek kelahiran, kematian, dan juga perpindahan penduduk

Pada beberapa teori disebutkan bahwa migrasi dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu migrasi paksaan dan migrasi spontan (bukan paksaan). Migrasi paksaan ini merupakan sebuah model perpindahan penduduk yang pada zaman kolonial dikenal sebagai perpindahan yang berorientasi pada upaya mendirikan pasar-pasar buruh yang semata-mata untuk kepentingan kaum kapitalis barat yang memerlukan tenaga buruh terampil dan murah

Model migrasi yang serupa dengan migrasi paksaan juga pernah diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Migrasi tersebut disebut sebagai transmigrasi, yang bertujuan melakukan pemerataan penduduk dengan berorientasi pada peningkatan hidup dan kesejahteraan pada penduduk migran tersebut, juga secara beriringan membantu mengembangkan daerah tujuan transmigrasinya bersama dengan penduduk setempat

Transmigrasi menurut (Hardjono, 1971) adalah pemindahan penduduk dari suatu daerah yang ditempati ke daerah lain yang telah ditetapkan di wilayah Republik Indonesia yang ditujukan untuk pembangunan bangsa atau untuk alasan yang dianggap perlu bagi pemerintah. Dengan kata lain, transmigrasi selain sebagai program yang bertujuan untuk pemerataan penduduk antar wilayah, juga menjadi langkah awal pengembangan daerah pertanian baru sebagai penunjang penyediaan pangan sekaligus mengatasi persoalan ketenagakerjaan.

Penelitian lain oleh La Pona (1999) di Papua, diperoleh hasil bahwa translokal yang memiliki jaringan sosial aspek pertanian dengan transmigran ternyata mengadopsi banyak inovasi budidaya pertanian, demikian pula sebaliknya. Perubahan dalam aspek pertanian bagi translokal di daerah transmigrasi dimulai dari sebuah relasi (hubungan) yang baik dan saling menerima dalam perbedaan, sehingga terbangun sebuah jaringan yang saling menguntungkan lewat berbagai aktivitas sosial yang dilakukan secara bersama pula. Dengan tidak menonjolkan perbedaan akan tercipta ruang-ruang relasi yang lebih baik dan terarah pada tatanan sebuah masyarakat yang diharapkan dapat lebih memperhatikan sisi kemanfaatan secara bersama

Soewarto (1993) dalam penelitiannya di Papua menemukan bahwa jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan Papua meningkat dengan jumlah migran terbesar berasal dari daerah Sulawesi (39,65%), disusul daerah Jawa (35,76%) dan Maluku (14,44%) Tingginya migran dari Sulawesi masuk ke kota-kota di Papua karena faktor jarak yang dekat dan faktor kesempatan ekonomi Sebagian besar dari mereka bekerja sebagai pedagang hasil bumi dan laut, di samping juga bergerak di bidang industri kecil dan menengah Selain faktor jarak, faktor transportasi juga turut mendukung terjadinya arus migrasi dari berbagai daerah ke Papua Dengan kemudahan transportasi darat maupun udara tentu memberikan ruang gerak migrasi begitu cepat dari satu daerah ke daerah lain, dalam rangka mencari dan melakukan usaha-usaha yang merupakan bagian dari tujuan bermigrasi

Keberadaan migran di daerah tujuan baik secara spontan maupun bukan spontan tentu melakukan interaksi dengan penduduk lokal, karena migran dan penduduk lokal menjadi bagian dari masyarakat dan lingkungan sosial Dalam lingkungan tersebut pun akan selalu dilalui dengan berbagai aktivitas-aktivitas, dalam konteks yang berbeda dari masing-masing orang dengan posisi latar belakang yang berbeda-beda pula.

B. Mobilitas Penduduk di Papua Barat

Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah menuju ke wilayah lainnya. Mobilitas ini bisa dipengaruhi banyak tujuan, seperti tujuan ekonomi seperti pekerjaan, tujuan pendidikan seperti melanjutkan jenjang pendidikan, dan sebagainya. Pada bagian ini akan dibahas gambaran mobilitas penduduk di Papua Barat.

B.1. Migrasi di Papua Barat

Migrasi atau perpindahan penduduk memiliki sejarah panjang di Indonesia, yang bahkan dimulai sebelum Indonesia merdeka. Gelombang besar arus migrasi masuk ke Nusantara pertama terjadi pada sekitar tahun 2500 SM dari Semenanjung Yunan, Tiongkok Selatan (Setiawan, 2019). Awalnya migrasi dari luar wilayah bertujuan mencari tempat tinggal yang lebih cocok, lalu bergeser kepada tujuan perdagangan, hingga berakhir dengan eksploitasi sumber daya yang dilakukan oleh Kerajaan Belanda melalui serikat dagang mereka.

Seiring berkembangnya waktu, proses migrasi yang terjadi di Indonesia tidak sebatas pada warga negara asing masuk dan menetap ke Indonesia saja Migrasi antar wilayah di Indonesia juga terjadi, bahkan menjadi bagian kebijakan pemerintah untuk pemerataan penduduk dan kesejahteraan. Migrasi yang digagas oleh pemerintah Indonesia sendiri ini kemudian disebut dengan Transmigrasi.

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Papua, selama dilaksanakannya program transmigrasi di tanah Papua yang telah berlangsung sejak tahun 1964 sampai 1999, diketahui terdapat 78.000 KK transmigran yang masuk ke Pulau Papua (mencakup wilayah yang kemudian menjadi Provinsi Papua dan Papua Barat) Namun, pasca diberlakukan UU Otsus No 21 Tahun 2001, program transmigrasi sementara terhenti.

Meski program transmigrasi terhenti, namun dengan besarnya jumlah penduduk yang telah melakukan migrasi ke Papua dan Papua Barat, tentunya berpengaruh terhadap jumlah penduduk di daerah tujuan migrasi itu sendiri. Salah satu indikator untuk identifikasi awal transmigran adalah dengan melihat angka migrasi seumur hidup. Meski seiring berjalannya waktu, tentu saja tidak semua kasus migrasi seumur hidup merupakan transmigrasi, Mengingat kemajuan nteknologi transportasi saat ini, migrasi antar wilayah cukup mudah dilakukan. Mengingat juga bahwa angka migrasi seumur hidup hanya melihat perbedaan wilayah tempat

lahir dengan tempat tinggal saat ini, dan mengabaikan kemungkinan mobilitasi penduduk selama jangka waktu sejak lahir hingga sebelum saat ini.

Tabel 2.1 Migrasi Neto Seumur Hidup Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2022

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Fakfak	3 951	4 049	8 000
Kaimana	7 615	6 810	14 425
Teluk Wondama	3 494	2 824	6 319
Teluk Bintuni	17 784	10 052	27 837
Manokwari	24 979	24 033	49 012
Sorong Selatan	-610	-125	-733
Sorong	6 072	5 531	11 603
Raja Ampat	7 747	6 062	13 809
Tambrauw	1 033	1 076	2 108
Maybrat	-681	-34	-715
Manokwari Selatan	5 228	4 634	9 862
Pegunungan Arfak	-1 369	-1 114	-2 482
Kota Sorong	54 162	29 477	103 639
Papua Barat	129 406	113 277	242 683

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk (SP) dan *Long Form* Sensus Penduduk

Berdasarkan hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020, angka migrasi neto Provinsi Papua Barat adalah 242.683 jiwa. Atau ada penambahan 242.683 jiwa penduduk yang tempat lahirnya berada di luar wilayah Provinsi Papua Barat, dan penduduk tersebut saat ini berdiam di Papua Barat. Angka ini cukup signifikan karena mencapai 20,5 persen dari total seluruh penduduk di Provinsi Papua Barat.

Berdasarkan data pada tabel tersebut terlihat bahwa wilayah dengan angka migrasi neto terbesar adalah Kota Sorong, disusul oleh Kabupaten Manokwari, dan Kabupaten Teluk Bintuni. Pada wilayah tersebut, dapat dinyatakan bahwa penambahan jumlah penduduk dipengaruhi oleh pendatang dari wilayah lain. Sedangkan beberapa wilayah yang memiliki angka migrasi neto negatif seperti Kabupaten Sorong Selatan, Maybrat, dan Pegunungan Arfak, dapat dikatakan bahwa migrasi keluar seumur hidup yang lebih banyak dibandingkan migrasi masuk seumur hidup menyebabkan angka migrasi menjadi pengurang jumlah penduduk.

Berdasarkan La Pona (2009), beberapa wilayah yang menjadi tujuan transmigrasi di Papua Barat adalah Kabupaten Manokwari, termasuk juga Kabupaten Teluk Bintuni dan Manokwari Selatan yang merupakan pecahan wilayah Kabupaten Manokwari sebelumnya, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Teluk Wondama. Pada kasus tingginya angka migrasi seumur hidup di Kabupaten Manokwari, diasumsikan bahwa sedikit banyak dipengaruhi oleh adanya transmigrasi di wilayah tersebut, begitupun dengan Kabupaten Teluk Bintuni. Namun untuk wilayah Kota Sorong, terdapat kemungkinan faktor pemicu lain yang menyebabkan tingginya angka migrasi seumur hidup.

Berdasarkan tabel 2.1 juga diketahui bahwa pelaku migrasi netto seumur hidup di Papua Barat lebih banyak berjenis kelamin laki-laki dengan 129.406 migran, meski selisihnya dengan perempuan tidak begitu jauh dengan 113.277 migran.

Tabel 2.2 Migrasi Neto Risen Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2022

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Fakfak	-623	-721	-1 344
Kaimana	869	1 064	1 933
Teluk Wondama	507	597	1 104
Teluk Bintuni	698	321	1 019
Manokwari	-3 012	-1 757	-4 769
Sorong Selatan	261	615	876
Sorong	-5 022	-3 109	-8 131
Raja Ampat	1 362	1 253	2 616
Tambrauw	87	123	209
Maybrat	1 243	1 341	2 584
Manokwari Selatan	1 243	1 341	2 584
Pegunungan Arfak	-112	-17	-130
Kota Sorong	2 627	2 913	5 541
Papua Barat	7	3 652	3 659

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk (SP) dan Long Form Sensus Penduduk

Migrasi risen menunjukkan perubahan wilayah tempat tinggal seseorang antara 5 tahun yang lalu dengan wilayah tempat tinggalnya saat ini. Secara netto, migrasi risen di Papua Barat mencapai 3.659 orang. Jumlah ini cukup kecil jika dibandingkan dengan migrasi netto seumur hidup di Provinsi Papua Barat yang mencapai lebih dari 200 ribu.

Tentunya angka migrasi netto tidak dapat bercerita banyak terkait arus migrasi di suatu wilayah. Salah satu contohnya, pada wilayah dengan migrasi masuk tinggi dan migrasi keluar tinggi, tentunya secara netto dapat menghasilkan angka yang lebih kecil, padahal secara fenomena wilayah tersebut memiliki tingkat mobilitas penduduk yang tinggi.

Tentunya untuk melakukan analisis lebih dalam diperlukan data migrasi masuk dan migrasi keluar pada migrasi seumur hidup dan migrasi risen agar diperoleh gambaran yang lebih jelas terkait mobilitas penduduk di Papua Barat.

Berdasarkan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020, Migrasi Masuk Seumur Hidup di Provinsi Papua Barat mencapai 369.675 migran. Migrasi masuk seumur hidup ke Kota Sorong merupakan yang terbesar dengan 127.257 migran. Sementara migrasi masuk seumur hidup terendah adalah ke wilayah Pegunungan Arfak yang hanya sebanyak 528 migran.

Selain itu Migrasi Keluar Seumur Hidup Provinsi Papua Barat dan pindah ke berbagai wilayah lain adalah sebanyak 126.992 migran. Wilayah dengan jumlah migrasi keluar seumur hidup terbanyak adalah Kabupaten Sorong dengan 29.244, dan wilayah dengan migrasi keluar seumur hidup tersedikit adalah Kabupaten Manokwari Selatan dengan 1.764. Meski migrasi keluar terbesar merupakan kondisi di Kabupaten Sorong, namun Kabupaten yang memiliki

angka migrasi netto negatif adalah Kabupaten Sorong Selatan, Maybrat, dan Pegunungan Arfak. Hal ini menunjukkan bahwa pada wilayah dengan angka migrasi keluar yang tinggi belum tentu akan menghasilkan angka migrasi netto negatif.

Tabel 2.3 Migrasi Masuk Seumur Hidup, Migrasi Keluar Seumur Hidup, dan Migrasi Netto Seumur Hidup Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2022

Kabupaten/Kota	Kategori Migrasi		
	Migrasi Masuk	Migrasi Keluar	Migrasi Netto
(1)	(2)	(3)	(4)
Fakfak	20 263	12 263	8 000
Kaimana	18 203	3 778	14 425
Teluk Wondama	9 720	3 401	6 319
Teluk Bintuni	31 263	3 426	27 837
Manokwari	71 045	22 033	49 012
Sorong Selatan	9 870	10 603	-733
Sorong	40 847	29 244	11 603
Raja Ampat	19 506	5 697	13 809
Tambrau	4 690	2 582	2 108
Maybrat	4 858	5 573	-715
Manokwari Selatan	11 626	1 764	9 862
Pegunungan Arfak	528	3 010	-2 482
Kota Sorong	127 257	23 618	103 639
Papua Barat	369 675	126 992	242 683

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk (SP) dan Long Form Sensus Penduduk

Pada kasus migrasi risen, wilayah dengan pelaku migrasi masuk risen terbanyak adalah Kota Sorong dengan jumlah 15.296 migran, sementara yang tersedikit adalah Kabupaten Pegunungan Arfak dengan 214. Sementara migrasi keluar risen terbanyak terjadi di Kabupaten Sorong dengan 12.468, dan tersedikit di Kabupaten Manokwari Selatan dengan 276. Tingginya angka migrasi keluar risen di Kabupaten Sorong yang menimbulkan migrasi netto negatif yang cukup besar. Kabupaten lain yang juga memiliki angka migrasi netto negatif adalah Kabupaten Fakfak, Kabupaten Manokwari, dan Kabupaten Pegunungan Arfak.

Tabel 2.4 Migrasi Masuk Risen, Migrasi Keluar Risen, dan Migrasi Netto Risen Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2022

Kabupaten/Kota	Kategori Migrasi		
	Migrasi Masuk	Migrasi Keluar	Migrasi Netto
(1)	(2)	(3)	(4)
Fakfak	2 808	4 152	-1 344
Kaimana	3 470	1 537	1 933
Teluk Wondama	2 082	978	1 104
Teluk Bintuni	3 571	2 552	1 019
Manokwari	6 245	11 014	-4 769
Sorong Selatan	2 346	1 470	876
Sorong	4 337	12 468	-8 131
Raja Ampat	4 558	1 942	2 616
Tambrauw	933	724	209
Maybrat	3 135	551	2 584
Manokwari Selatan	2 428	276	2 584
Pegunungan Arfak	214	344	-130
Kota Sorong	15 296	9 755	5 541
Papua Barat	51 423	47 764	3 659

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk (SP) dan *Long Form* Sensus Penduduk

B.2. Arus Migrasi Penduduk

Setelah melihat besaran angka migrasi masuk, migrasi keluar, dan migrasi netto di masing-masing wilayah di Provinsi Papua Barat, tentu menarik untuk melihat lebih lanjut tempat asal dan tempat tujuan dari para pelaku migrasi ini. Dengan melihat lebih lanjut tempat asal dan tempat tujuan migrasi, dapat diperoleh gambaran arus migrasi antar kabupaten/kota di dalam Provinsi Papua Barat juga migrasi antar provinsi.

Berdasarkan hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020, pada migrasi masuk seumur hidup diperoleh hasil asal kabupaten tempat lahir pelaku migrasi seumur hidup mayoritas berasal dari luar Provinsi Papua Barat dengan beberapa wilayah yang sering muncul adalah Provinsi Papua, Maluku, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Begitupun pada pelaku migrasi masuk risen, yang juga masih didominasi penduduk yang berasal dari Provinsi Papua, Maluku, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Jika dibandingkan dengan angka migrasi internal provinsi, angka migrasi dari dan keluar provinsi jauh lebih besar.

Arus Migrasi Antarkabupaten/kota dalam provinsi baik untuk migrasi seumur hidup maupun migrasi risen memiliki pola yang tidak jauh berbeda. Kabupaten/kota dengan angka migrasi keluar seumur hidup antara kabupaten kota terbanyak adalah Kabupaten Sorong Selatan yang mencapai 9.003 dengan wilayah kabupaten/kota tujuan utama Kota Sorong dengan 5.159 dan Kabupaten Manokwari 1.344. Sementara kabupaten/kota dengan angka migrasi keluar seumur hidup tersedikit adalah Kabupaten Pegunungan Arfak dengan 1.387 dengan kabupaten/kota tujuan utama adalah Kabupaten Manokwari dengan 874 dan Kabupaten Manokwari Selatan 402.

C. Papua Barat dan Potensinya Menjadi Wilayah Tujuan Migrasi

Sebagai wilayah yang pernah menjadi tujuan lokasi program transmigrasi, tentunya Papua Barat memiliki potensi wilayah yang dinilai menarik untuk dapat dikembangkan. Potensi ini dapat berupa kekayaan sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi penunjang perekonomian seperti sektor pertanian, pertambangan, pariwisata, dan sebagainya.

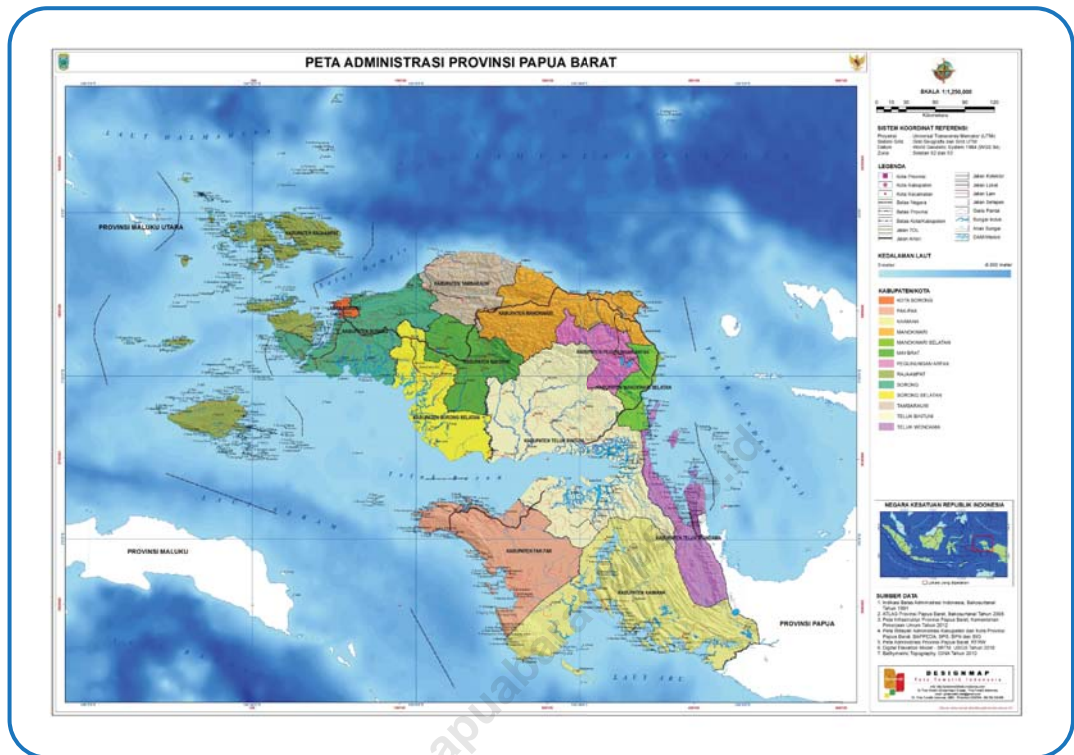
C.1. Papua Barat, Surga Kecil di Timur Indonesia

Provinsi Papua Barat atau sebelumnya disebut Provinsi Irian Jaya Barat merupakan provinsi yang terbentuk setelah era reformasi atau bukan merupakan provinsi yang terbentuk sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi Papua Barat merupakan wilayah yang terbentuk pada 12 Oktober 1999 melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999, pemekaran dari Provinsi Papua atau sebelumnya disebut sebagai Provinsi Irian Jaya. Meski secara undang-undang Provinsi Papua Barat sudah disahkan sejak tahun 1999, namun secara riil Papua Barat baru memisahkan diri dari Papua sekitar tahun 2001.

Provinsi Papua Barat memiliki luas wilayah 102.955,15 km², dan terbagi dalam 13 wilayah administrasi kabupaten/kota meliputi 12 kabupaten dan 1 kota. Dengan luas tersebut menjadikan Papua Barat menjadi provinsi kelima terluas dari 34 provinsi di Indonesia.

Papua Barat membentang luas dari wilayah kepulauan yang tercakup dalam Kabupaten Raja Ampat, wilayah pesisir seperti Kabupaten Fakfak, Kaimana, Kabupaten dan Kota Sorong, Manokwari, dan Teluk Wondama, juga wilayah dataran tinggi seperti Kabupaten Pegunungan Arfak. Dengan kondisi bentang alam yang beragam, Papua Barat mempunyai potensi yang luar biasa, baik itu pertanian, pertambangan, hasil hutan maupun pariwisata. Mutiara dan rumput laut dihasilkan di kabupaten Raja Ampat, sedangkan satu-satunya industri tradisional tenun ikat yang disebut kain Timor dihasilkan di kabupaten Sorong Selatan. Sirup pala harum dapat diperoleh di kabupaten Fakfak serta beragam potensi lainnya. Selain itu wisata alam juga menjadi salah satu andalan Irian Jaya Barat, seperti Taman Nasional Teluk Cenderawasih yang berlokasi di Kabupaten Teluk Wondama. Taman Nasional ini membentang dari timur Semenanjung Kwatisore sampai utara Pulau Rumberpon dengan panjang garis pantai 500 km, luas darat mencapai 68.200 ha, luas laut 1.385.300 ha dengan rincian 80.000 ha kawasan terumbu karang dan 12.400 ha lautan.

Gambar 2.1 Peta Wilayah Provinsi Papua Barat



Sumber: Peta Tematik Indonesia

C.2. Kondisi Sosial-Ekonomi Papua Barat

Mantra (1992) mengatakan, arus migrasi makin meningkat setelah tersedianya prasarana transportasi yang dapat menghubungkan antar wilayah. Selain itu perkembangan pembangunan yang begitu cepat pada daerah-daerah tertentu yang didukung dengan kebijakan desentralisasi ikut merangsang arus migrasi untuk mencoba memperbaiki hidup di daerah-daerah tersebut. Berkaitan dengan peluang-peluang di daerah tujuan yang menjadi daya Tarik individu bermigrasi menurut Munir disebabkan oleh lima faktor:

1. Adanya kesepakatan untuk memasuki lapangan pekerjaan yang cocok;
2. Adanya kesempatan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik
3. Ketiga, adanya kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi;
4. Keempat, adanya keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang lebih menyenangkan;
5. Kelima, adanya tarikan dari orang yang diharapkan sebagai tempat untuk berlindung

Kelima faktor daya tarik pada daerah tujuan yang dikemukakan Munir ini menjadi pertimbangan individu pada umumnya dalam memutuskan bermigrasi (Munir, 1981). Pertimbangan rasional itulah yang selalu didahulukan oleh seorang migran, karena tujuan utama seorang migran melakukan migrasi sesungguhnya ingin melakukan dan mendapatkan perubahan kondisi kehidupan. Meskipun demikian, tidak semua migran mengalami kondisi yang sama, ada yang sukses tapi ada juga yang gagal. Hal ini tergantung bagaimana sikap migran tersebut dalam memaknai arti bermigrasi. Bagi migran yang sukses memilih untuk bertahan dan kemudian menjadi migrasi permanen, sedangkan yang gagal kembali ke daerah asal atau memilih migrasi ke daerah lain yang memiliki peluang secara ekonomi. Di

daerah-daerah dengan desentralisasi khusus atau disebut otonomi khusus masih memiliki peluang-peluang ekonomi, yaitu tersedianya Sumber Daya Alam (SDA) yang cukup banyak bila dibandingkan dengan jumlah penduduknya (pemiliknya) Kondisi ini menjadi magnet bagi orang-orang untuk memilih bermigrasi ke daerah tersebut, dan migrasi yang dilakukan pun bermacam-macam.

Salah satu pendataan BPS yang berkaitan dengan jumlah fasilitas umum di masing-masing wilayah adalah Pendataan Potensi Desa (PODES). Berdasarkan hasil PODES 2021, sudah tidak terdapat Satuan Pemukiman Transmigrasi (SPT) atau Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) di Provinsi Papua Barat. Hal ini menunjukkan bahwa pemukiman transmigran yang sebelumnya dibentuk selama periode program transmigrasi sudah berubah menjadi desa/kelurahan.

Adapun terkait fasilitas umum yang ada, hampir seluruh kabupaten/kota memiliki fasilitas tempat ibadah untuk agama islam, kristen protestan, dan katolik. Masih ada beberapa kabupaten kota yang belum memiliki fasilitas tempat ibadah untuk agama hindu, budha, dan konghuchu. Meski secara kabupaten/kota fasilitas tempat ibadah sudah cukup merata, namun jika dilihat berdasarkan jumlah desa yang tidak memiliki tempat ibadah, jumlahnya mencapai 456 desa di Papua Barat. Melihat sebaran yang sudah cukup baik, dapat dikatakan fasilitas tempat ibadah bukan menjadi suatu faktor pendorong dan penarik melakukan migrasi.

Dari segi jumlah desa dengan fasilitas transportasi atau angkutan umum, masih terdapat 712 desa tanpa ketersediaan angkutan umum. Sementara 1274 desa lainnya memiliki akses angkutan umum dengan trayek tetap dan tanpa trayek tetap. Meningat pentingnya transportasi untuk mobilitas penduduk di masa sekarang, seperti akses ke fasilitas pendidikan yaitu sekolah, fasilitas ekonomi seperti toko dan pasar, serta fasilitas keuangan seperti koperasi dan perbankan, maka ketiadaan fasilitas umum dapat menjadi salah satu faktor pendorong seseorang untuk pindah ke wilayah lain,

Lalu untuk akses komunikasi, masih terdapat 553 desa tanpa akses sinyal telepon seluler, sehingga akses komunikasi dari wilayah desa tersebut ke wilayah lain menjadi sulit. Apalagi mengingat jasa ekspedisi dan pengiriman lainnya seperti PT Pos Indonesia, maupun jasa ekspedisi swasta lain tidak tersebar luas di seluruh wilayah atau hanya terdapat pada beberapa distrik/kecamatan yang dianggap cukup besar atau cukup ramai saja.

.Jika dari segi keamanan, hanya 108 desa yang terdapat lokasi pos/kantor polisi. Sementara 1878 desa lainnya, tidak ada. Tentunya hal ini menjadi faktor pendorong dilakukan migrasi terutama untuk beberapa wilayah yang dirasa kurang aman atau termasuk dalam zona merah. Keberadaan kantor polisi dapat memberi rasa aman kepada penduduk yang tinggal di wilayah tersebut.

Fasilitas lain yang juga berkaitan dengan seseorang melakukan migrasi terutama pada penduduk usia muda adalah ketersediaan fasilitas pendidikan di suatu wilayah. Untuk fasilitas pendidikan tingkat taman kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA/ sederajat) hampir seluruh kabupaten/kota sudah memiliki fasilitas tersebut. Sehingga keputusan migrasi antar kabupaten/kota karena menempuh pendidikan pada jenjang tersebut cenderung kecil. Kasus yang berbeda untuk Akademi/Perguruan Tinggi. Dari 13 kabupaten/kota di Papua Barat, hanya 7 kabupaten/kota yang memiliki akademi/ perguruan tinggi di wilayahnya. Mengingat jarak dan waktu tempuh antar kabupaten/kota di Papua Barat yang cukup jauh dan lama, serta terbatasnya akses transportasi umum antar wilayah yang beroperasi secara rutin setiap hari dengan jam operasional yang banyak, tentunya ketidakterediaan akademi/ perguruan tinggi di beberapa kabupaten/kota menjadi faktor pendorong dilakukan migrasi untuk penduduk yang berniat melanjutkan sekolah.

Dari segi perekonomian suatu wilayah, salah satu indikator yang dapat dilihat adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan indikator perkembangan ekonomi suatu wilayah.

Tabel 2.5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut Kabupaten/Kota (miliar rupiah), 2022

Kabupaten/Kota	PDRB ADHB	PDRB ADHK	Pertumbuhan Ekonomi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Fakfak	5 598,82	3 551,88	2,24
Kaimana	2 580,27	1 735,22	1,12
Teluk Wondama	1 663,27	1 021,74	3,20
Teluk Bintuni	34 935,20	25 564,58	2,02
Manokwari	10 292,13	6 761,04	2,06
Sorong Selatan	2 104,65	1 374,74	5,71
Sorong	11 545,12	8 701,91	2,12
Raja Ampat	4 066,08	2 843,21	11,97
Tambrauw	255,92	152,16	3,17
Maybrat	783,84	479,23	2,47
Manokwari Selatan	887,71	593,17	1,98
Pegunungan Arfak	279,44	180,20	13,97
Kota Sorong	16 169,13	10 166,69	1,88
Papua Barat	91 291,75	62 518,38	2,01

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk (SP) dan *Long Form* Sensus Penduduk

Berdasarkan PDRB tahun 2022 terlihat bahwa nilai PDRB Papua Barat sebesar 91,29 triliun rupiah, dengan pertumbuhan terhadap tahun 2021 mencapai 2,01 persen. Adapun kabupaten/kota penunjang perekonomian Provinsi Papua Barat terbesar adalah Kabupaten Teluk Bintuni dengan nilai 34,94 triliun rupiah, disusul oleh Kota Sorong dengan nilai 16,17 triliun rupiah. Besarnya nilai PDRB Kabupaten Teluk Bintuni utamanya ditunjang oleh adanya perusahaan pertambangan gas alam, sementara Kota Sorong ditunjang oleh sektor jasa seperti perdagangan, transportasi, dan akomodasi serta penyediaan makan minum.

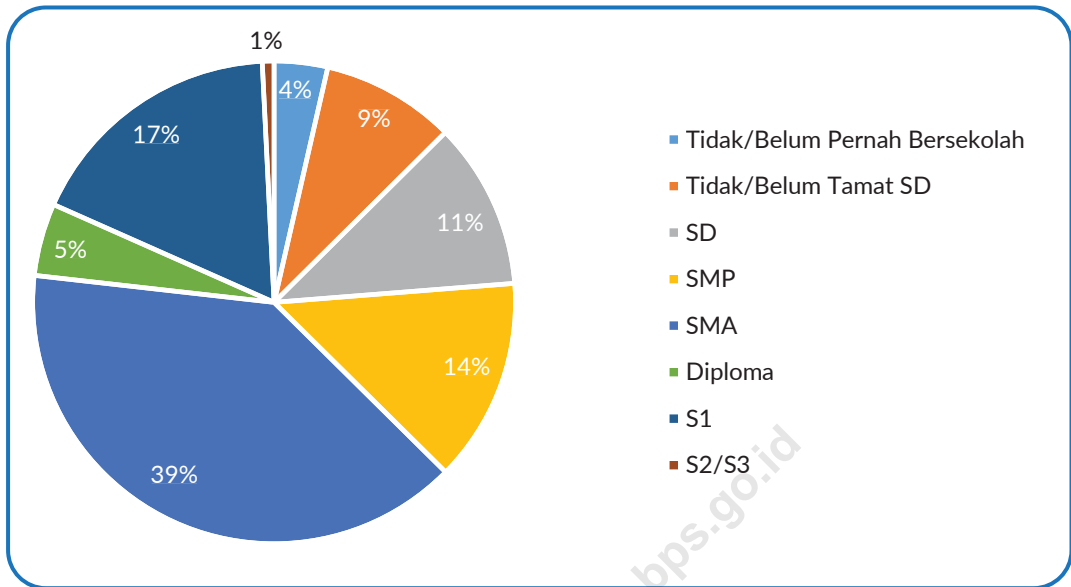
D. Migran dan Kesejahterannya

Untuk melihat kesejahteraan para pelaku migrasi, beberapa hal yang dapat dilihat adalah akses terhadap fasilitas pendidikan, lapangan pekerjaan, serta akses terhadap rumah layak huni.

D.1. Pendidikan adalah Langkah Awal Pengembangan Potensi Diri

Pendidikan menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Gambar 2.2 Persentase Migran Risen menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk (SP) dan *Long Form* Sensus Penduduk

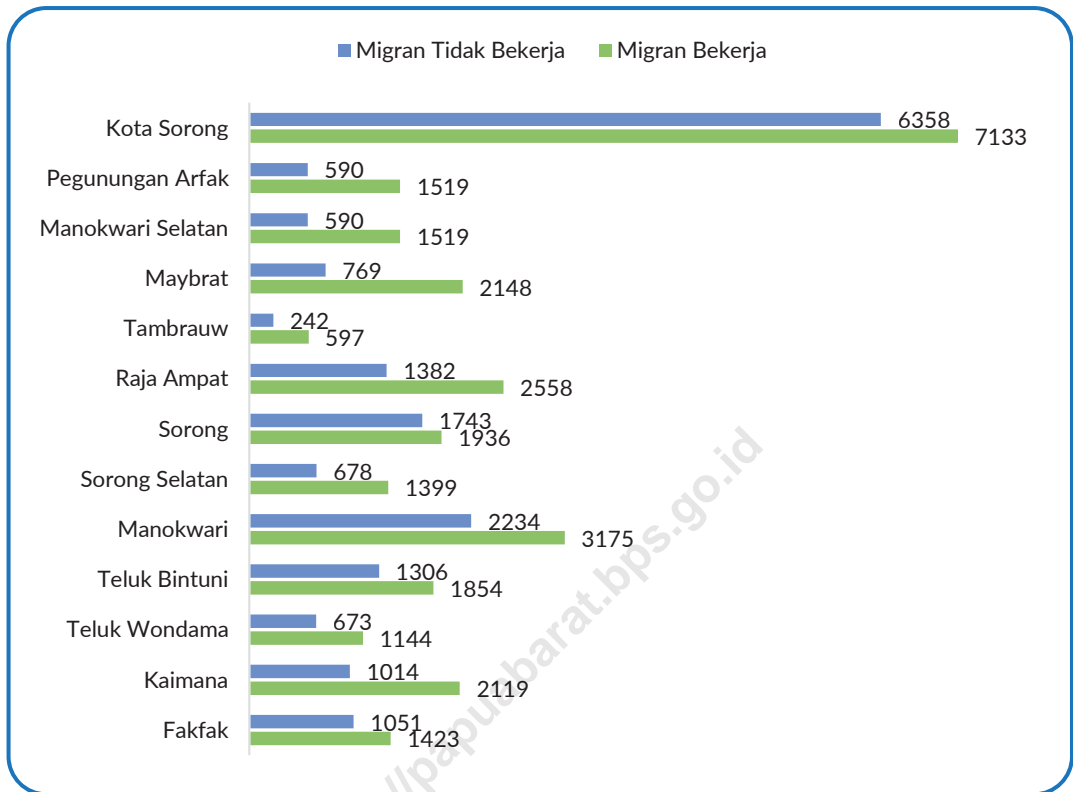
Berdasarkan hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020, diperoleh hasil bahwa sebagian besar migran risen telah menyelesaikan pendidikan SMA ke atas. Meski begitu, persentase migran risen yang belum berhasil menyelesaikan pendidikan dasar hingga minimal SMP sederajat mencapai 24 persen. Tentunya pemerintah perlu lebih menggalakkan program sosialisasi dan program lain yang dapat menjadi pendorong para migran untuk melanjutkan sekolah baik. Program subsidi pendidikan, dan program kejar paket yang gencar disosialisasikan ke kalangan masyarakat yang sempat putus sekolah, diharapkan mampu meningkatkan level pendidikan para migran, juga tentunya para penduduk lokal. Karena tanpa dilakukan intervensi oleh pemerintah, akan muncul risiko migran menjadi beban yang menarik turun capaian kabupaten/kota secara menyeluruh.

Tentu pada kasus penduduk yang lebih tua, seperti pada penduduk di atas 60 tahun, pendidikan sudah bukan menjadi fokus. Beberapa pihak juga menganggap untuk dapat dilakukan intervensi oleh pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan level pendidikan masyarakat perlu lebih difokuskan pada kelompok umur penduduk yang masih bersekolah, yaitu di bawah 30 tahun.

D.2. Kegiatan Perekonomian Migran

Tentunya selain tingkat pendidikan, perlu kita lihat kegiatan perekonomian migran risen di Papua Barat. Hal ini bertujuan untuk melihat apakah seberapa banyak migran yang bekerja, dan tidak bekerja, yang akan digunakan untuk melihat indikasi migran risen berpengaruh pada meningkatnya tingkat pengangguran di Papua Barat.

Gambar 2.3 Migran Risen Usia 15 Tahun Ke Atas menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu, 2022

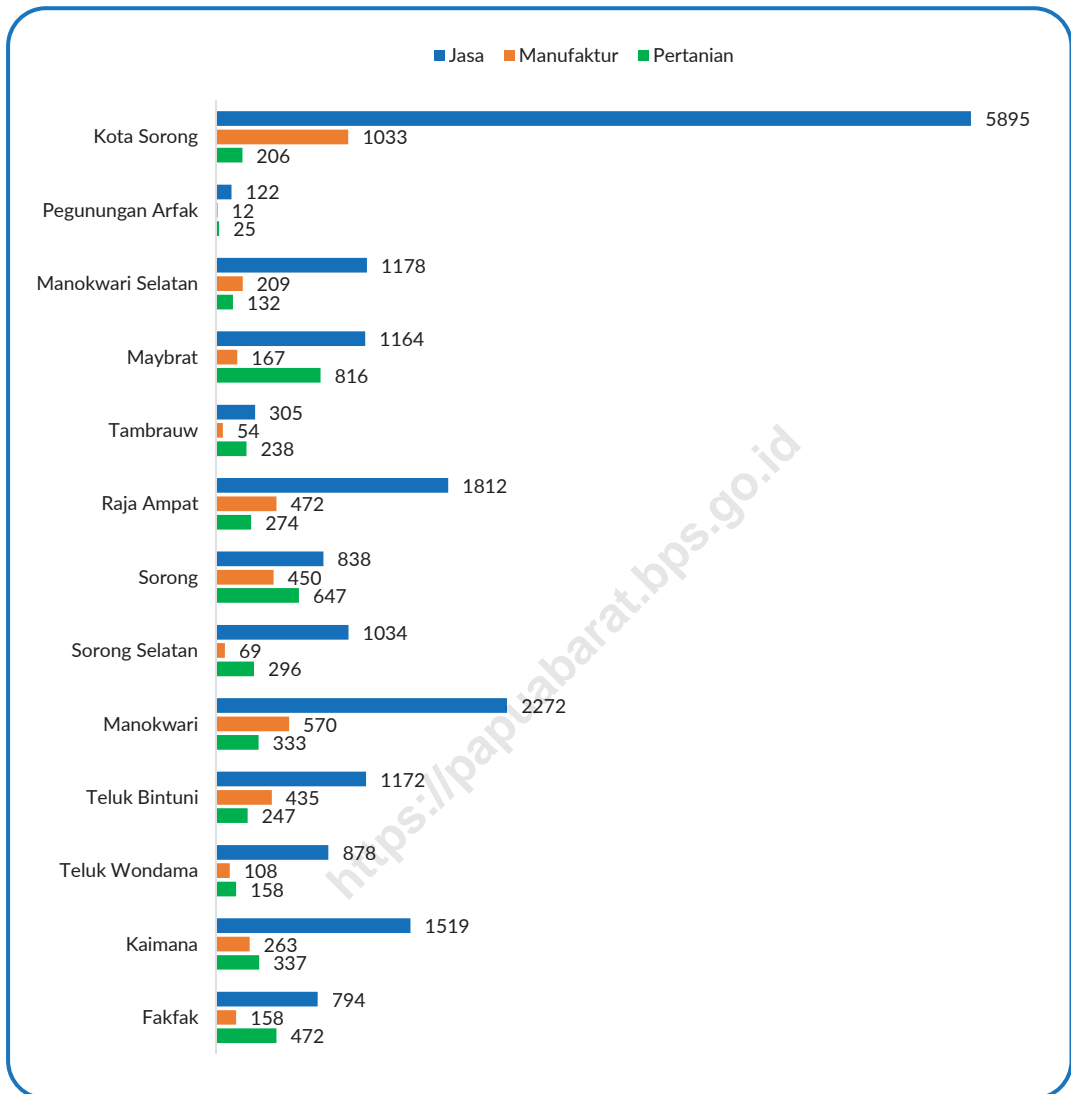


Sumber: Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk (SP) dan *Long Form* Sensus Penduduk

Pada gambar 2.3 dapat dilihat bahwa di seluruh kabupaten/kota, jumlah migran usia 15 tahun ke atas yang bekerja di atas jumlah migran yang tidak bekerja. Dengan jumlah migran bekerja terbanyak berada di Kota Sorong mengingat Kota Sorong juga merupakan wilayah dengan migran masuk terbanyak.

Masih berdasarkan hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020, mayoritas migran risen di atas usia 15 tahun yang bekerja, merupakan pekerja maupun pengusaha yang bergerak pada sektor jasa, disusul pada sektor pertanian, dan yang terakhir adalah industri manufaktur. Persentase migran risen usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor jasa di Provinsi Papua Barat mencapai 69,89 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor pertanian sudah tidak begitu diminati oleh pelaku migrasi. Beberapa faktor yang mungkin memengaruhi adalah sulitnya memperoleh lahan pertanian untuk dikelola sebagai milik sendiri, kondisi lahan dan jenis varietas tanaman yang dapat dikembangkan tidak terlalu bervariasi, serta kondisi cuaca dan angin laut yang tidak menentu sehingga menyulitkan dalam melaut, memungkinkan para migran untuk mengganti sektor lapangan usaha pekerjaan utamanya, dan menjadikan usaha pertanian sebagai pekerjaan tambahan.

Gambar 2.4 Migran Risen Usia 15 Tahun Ke Atas menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu, 2022

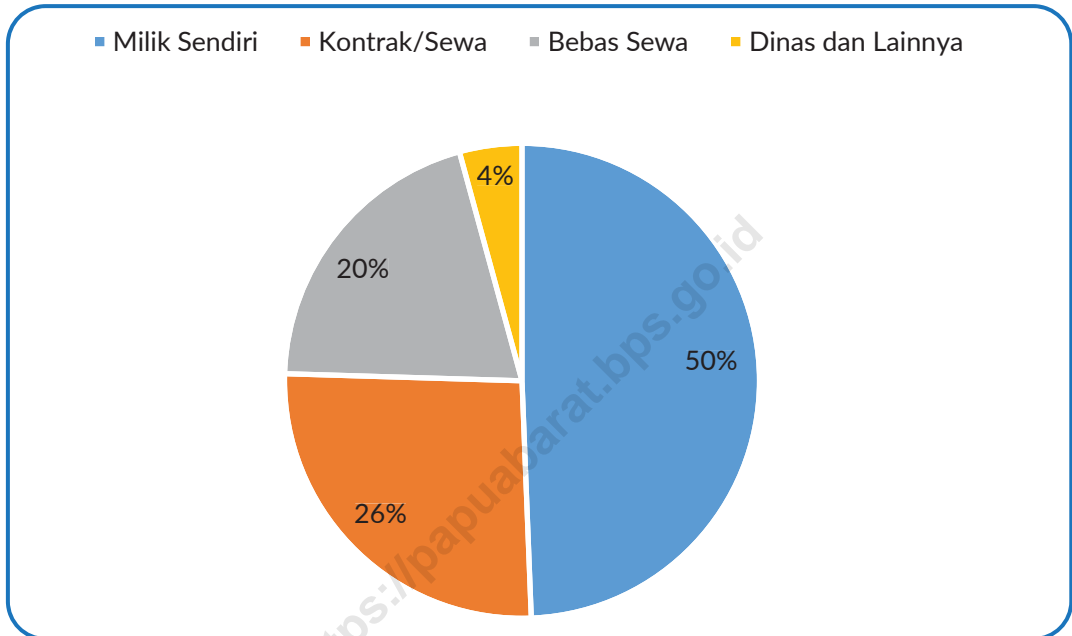


Sumber: Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk (SP) dan Long Form Sensus Penduduk

D.3. Kepemilikan Tempat Tinggal

Dalam petuah Orang Jawa dikemukakan bahwa kebutuhan dasar manusia mencakup sandang, pangan, papan atau yang dapat diartikan pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Mengingat hal tersebut, tentunya untuk dikatakan sejahtera, minimal seseorang atau keluarga tersebut haruslah memiliki tempat tinggal.

Gambar 2.5 Persentase Migran Risen menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal, 2022



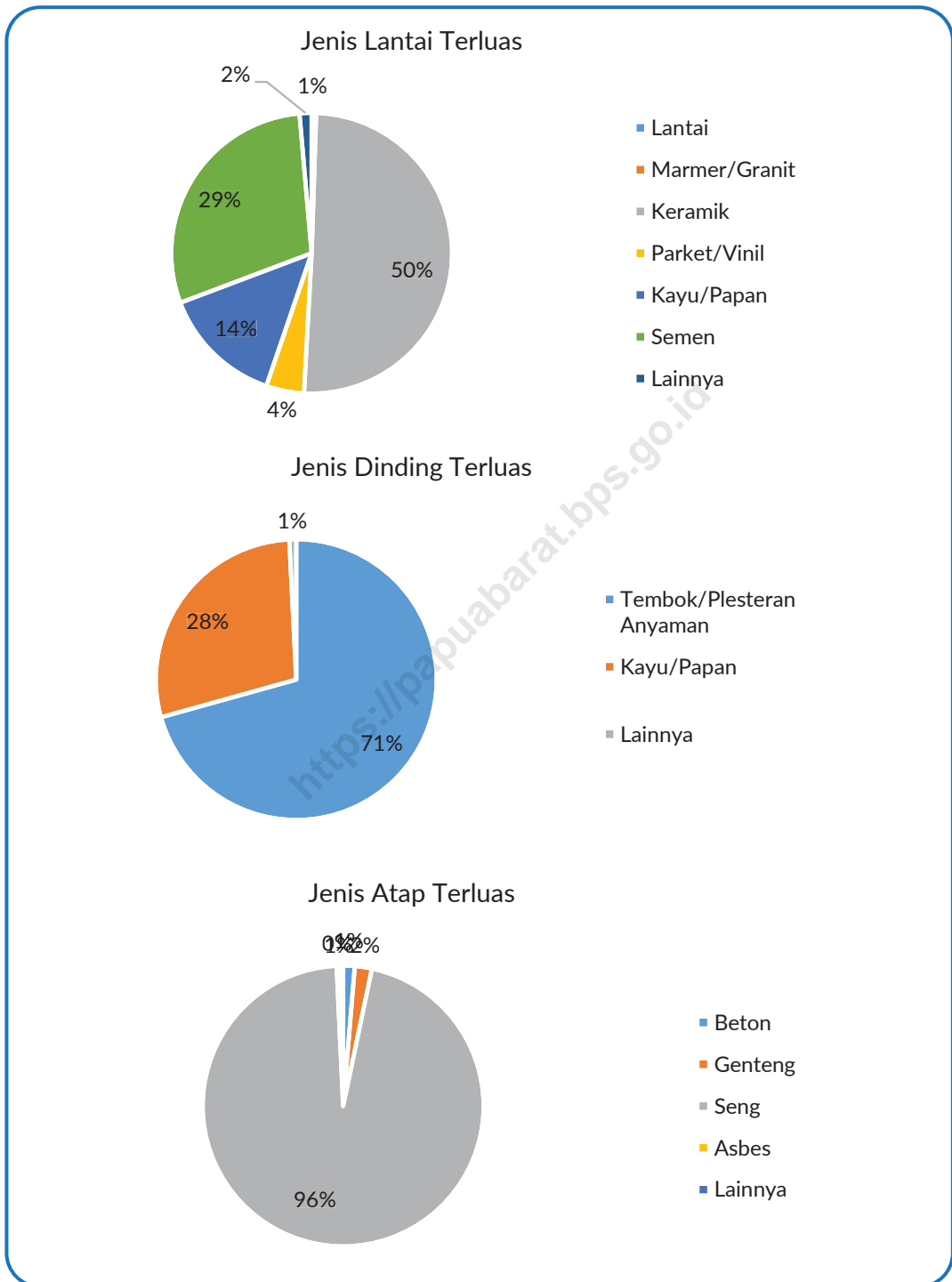
Sumber: Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk (SP) dan *Long Form* Sensus Penduduk

Pada Gambar 2.5 terlihat bahwa terdapat 50 persen migran risen yang sudah tinggal di bangunan milik sendiri. Hal ini menunjukkan migran risen memiliki akses untuk memiliki rumah sendiri di wilayah tempat tinggalnya saat ini, mengingat kepemilikan tempat tinggal penting untuk melihat tingkat kesejahteraan seseorang.

Tentunya aspek rumah tinggal tidak dapat dinilai hanya dari segi kepemilikan saja, melainkan juga kondisi rumah tinggal itu sendiri. Sebuah bangunan dapat dikatakan rumah tinggal yang layak jika setidaknya memenuhi kriteria tertentu, seperti kualitas lantai, dinding, dan atap bangunan.

Pada jenis lantai terluas, lebih dari 50 persen migran telah memiliki rumah dengan jenis lantai terluas marmer/granit dan keramik. Pada tembok terluas, lebih 50 persen migran juga telah menggunakan tembok atau plasteran anyaman bambu. Sedangkan untuk atap terluas, masih didominasi oleh atap seng. Hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan bahan di Papua Barat, dimana atap yang terbuat dari genteng sulit ditemui.

Gambar 2.6 Persentase Migran menurut Jenis Atas, Dinding, dan Lantai Terluas Tempat Tinggal, 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk (SP) dan Long Form Sensus Penduduk

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020, angka migrasi neto Provinsi Papua Barat adalah 242.683 jiwa. Atau ada tambahan 242.683 jiwa penduduk yang tempat lahirnya berada di luar wilayah Provinsi Papua Barat, dan penduduk tersebut saat ini berdomisili di Papua Barat. Angka ini cukup signifikan karena mencapai 20,5 persen dari total seluruh penduduk di Provinsi Papua Barat. Sementara pada migrasi risen secara netto, migrasi risen di Papua Barat mencapai 3.659 orang. Jumlah ini cukup kecil jika dibandingkan dengan migrasi netto seumur hidup di Provinsi Papua Barat yang mencapai lebih dari 200 ribu.

Wilayah yang menjadi tujuan utama migrasi di Papua Barat adalah Kota Sorong yang merupakan wilayah dengan fasilitas pendidikan, kesehatan dan penunjang perekonomian lain yang jauh lebih lengkap dibandingkan wilayah lain di Provinsi Papua Barat. Kota Sorong juga merupakan wilayah dengan *share* PDRB terbesar kedua di Papua Barat setelah Kabupaten Teluk Bintuni.

Meski secara teori tujuan migrasi adalah untuk memperoleh hal-hal yang sulit diperoleh di wilayah asal, seperti pekerjaan dan pendidikan, tidak dapat disimpulkan bahwa hal yang sama terjadi di wilayah Papua Barat. Mengingat sebagian besar pelaku migrasi di Papua Barat bermula dengan program transmigrasi, dan kondisi perkembangan fasilitas umum di Papua Barat sebelumnya dapat dikatakan masih berada di bawah wilayah asal para pelaku transmigrasi, hal ini menyebabkan para transmigran lebih berfokus pada bekerja mengurus ladang dibandingkan melanjutkan pendidikan. Hal ini menjadi salah satu pemicu tingginya angka pelaku migrasi yang tidak menempuh pendidikan atau tidak menyelesaikan pendidikan dasarnya.

Pada jumlah migran risen usia 15 tahun ke atas, lebih dari 50 persennya adalah migran yang bekerja. Hal ini secara merata terjadi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. Lapangan Usaha Pekerjaan Utama migran risen mayoritas berada pada sektor yang mencakup sektor perdagangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan, usaha jasa akomodasi, dan sebagainya.

F. Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2012). *Estimasi Parameter Demografi: Tren Fertilitas, Mortalitas, dan Migrasi*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Statistik Migrasi Indonesia Hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2015*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Migrasi Indonesia Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Potensi Desa Provinsi Papua Barat 2021*. Manokwari: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat. (2012). *Statistik Migrasi Papua Barat Hasil Sensus Penduduk 2010*. Manokwari: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat. (2023a). *Penduduk Provinsi Papua Barat Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020*. Manokwari: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat. (2023b). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Papua Barat menurut Lapangan Usaha 2018-2022*. Manokwari: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat. (2023b). *Statistik Migrasi Provinsi Papua Barat*

Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020. Manokwari: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat

- Brueckner, J. et al. (2021) Introduction to special issue on rural-urban migration in honor of Harris and Todaro, *Regional Science and Urban Economics*, <https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2021.103716>. Diakses melalui <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166046221000764> pada 18 Agustus 2023.
- Grigg, D. B. (1977). *E.G. Ravenstein and The Law of Migration*. *The Journal of Historical Geography*, 3, 1 halaman 41-54. Diakses melalui <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0305748877901438> pada 20 Agustus 2023
- Harjono, J. (1970). *Transmigration In Indonesia*. Kuala Lumpur: Oxford University Press
- La Pona. (1999). *Difusi Inovasi Budi Daya Pertanian dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi : Studi Kasus di Lokasi Transmigrasi Arso Kabupaten Jayapura Provinsi Papua*. Disertasi. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada
- La Pona. (2009). *Transmigrasi di Era Otonomi Khusus di Provinsi Papua*. *Humaniora*.21. Hal 350-362. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/11686-ID-transmigrasi-era-otonomi-khusus-di-provinsi-papua.pdf> pada 22 Agustus 2023
- Lee, Everett. S.(1976). *Teori Migrasi*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
- Mantra, Ida Bagoes.(2008). *Pengantar Studi Demografi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munir, Rozy. (1981). *Dasar-dasar Demografi*. Jakarta: LDFE Universitas Indonesia
- Peta Tematik Indonesia. Peta Provinsi Papua Barat. Diakses melalui <https://petatematikindonesia.wordpress.com/2013/01/14/administrasi-provinsi-papua-barat/> pada 18 Agustus 2023
- Piguet, Etien. (2018). *Theories of Voluntary and Forced Migration*. Diakses melalui https://www.researchgate.net/publication/330467507_Theories_of_voluntary_and_forced_migration pada 19 Agustus 2023.
- Ravenstein, Ernst Georg. (1985). *Teori Migrasi*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
- Swasono, S. (1986). *Reorientasi dalam transmigrasi: Merencanakan keunggulan komparatif, dalam S. Swasono & M. Singarimbun (Ed.), Transmigrasi di Indonesia 1905-1985 (hal. 362-369)*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Todaro, P. Michael. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, ed.7.Terjemahan Burhanudin Abdulloh*. Jakarta: Erlangga.

G. Lampiran

1. Lampiran 2.1 Lima Besar Provinsi Asal Migran Seumur Hidup Menurut Kabupaten/Kota, 2022
2. Lampiran 2.2 Lima Besar Provinsi Tujuan Migran Seumur Hidup Menurut Kabupaten/Kota, 2022
3. Lampiran 2.3 Lima Besar Provinsi Asal Migran Risen Menurut Kabupaten/Kota, 2022
4. Lampiran 2.4 Lima Besar Provinsi Tujuan Migran Seumur Hidup Menurut Kabupaten/Kota, 2022

Lampiran 2.1 Lima Besar Provinsi Asal Migran Seumur Hidup Menurut Kabupaten/Kota, 2022

Tempat Tinggal Sekarang	Urutan	Provinsi Tempat Lahir	Persentase Jumlah Migran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Fakfak	1	Maluku	38,29
	2	Sulawesi Selatan	10,15
	3	Sulawesi Tenggara	9,11
	4	Jawa Timur	7,91
	5	Papua	7,15
Kaimana	1	Maluku	33,09
	2	Sulawesi Selatan	19,08
	3	Sulawesi Tenggara	8,93
	4	Jawa Timur	8,36
	5	Papua	8,32
Teluk Wondama	1	Sulawesi Tenggara	22,12
	2	Papua	22,07
	3	Sulawesi Selatan	21,75
	4	Maluku	8,20
	5	Jawa Timur	5,57
Teluk Bintuni	1	Sulawesi Selatan	25,63
	2	Jawa Timur	11,73
	3	Maluku	10,55
	4	Papua	9,84
	5	Jawa Tengah	9,56
Manokwari	1	Jawa Timur	19,24
	2	Jawa Tengah	17,30
	3	Papua	14,91
	4	Sulawesi Selatan	14,55
	5	Nusa Tenggara Timur	7,18
Sorong Selatan	1	Sulawesi Selatan	30,34
	2	Jawa Timur	20,34
	3	Maluku	9,16
	4	Papua	7,00
	5	Jawa Tengah	5,68
Sorong	1	Jawa Timur	28,81
	2	Jawa Tengah	19,83
	3	Maluku	9,39
	4	Sulawesi Selatan	6,72
	5	Papua	5,57

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk (SP) dan Long Form Sensus Penduduk

Lampiran 2.1 Lima Besar Provinsi Asal Migran Seumur Hidup Menurut Kabupaten/Kota, 2022 (lanjutan)

Tempat Tinggal Sekarang	Urutan	Provinsi Tempat Lahir	Persentase Jumlah Migran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Raja Ampat	1	Sulawesi Tenggara	19,69
	2	Sulawesi Selatan	6,72
	3	Maluku	14,39
	4	Papua	12,36
	5	Maluku Utara	11,55
Tambrau	1	Papua	26,16
	2	Sulawesi Selatan	17,81
	3	Sulawesi Tenggara	16,34
	4	Maluku	10,89
	5	Nusa Tenggara Timur	6,48
Maybrat	1	Papua	26,89
	2	Maluku	20,80
	3	Sulawesi Selatan	15,60
	4	Nusa Tenggara Timur	12,22
	5	Jawa Tengah	4,78
Manokwari Selatan	1	Papua	21,52
	2	Sulawesi Selatan	15,88
	3	Jawa Timur	13,49
	4	Jawa Tengah	12,41
	5	Sulawesi Tenggara	7,75
Pegunungan Arfak	1	Sulawesi Selatan	37,60
	2	Sulawesi Utara	13,04
	3	Maluku Utara	11,76
	4	Sumatera Utara	8,44
	5	Nusa Tenggara Timur	5,63
Kota Sorong	1	Sulawesi Selatan	20,96
	2	Maluku	20,02
	3	Jawa Timur	11,77
	4	Papua	10,26
	5	Sulawesi Utara	7,02

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk (SP) dan Long Form Sensus Penduduk

Lampiran 2.2 Lima Besar Provinsi Tujuan Migran Seumur Hidup Menurut Kabupaten/Kota, 2022

Tempat Lahir	Urutan	Provinsi Tujuan	Persentase Jumlah Migran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Fakfak	1	Papua	42,06
	2	Maluku	15,43
	3	Jawa Timur	6,68
	4	Jawa Tengah	5,77
	5	Sulawesi Selatan	5,44
Kaimana	1	Papua	44,29
	2	Maluku	17,01
	3	Sulawesi Tenggara	8,03
	4	DKI Jakarta	6,24
	5	Jawa Timur	5,25
Teluk Wondama	1	Papua	44,75
	2	Sulawesi Tenggara	12,29
	3	Maluku	9,56
	4	Jawa Timur	9,24
	5	Bali	8,30
Teluk Bintuni	1	Sulawesi Selatan	32,15
	2	Papua	28,00
	3	Jawa Timur	9,08
	4	Sulawesi Tenggara	6,66
	5	Maluku	5,53
Manokwari	1	Papua	44,28
	2	Jawa Timur	9,78
	3	Jawa Tengah	7,61
	4	Sulawesi Selatan	7,07
	5	Jawa Barat	4,80
Sorong Selatan	1	Papua	51,84
	2	Sulawesi Selatan	17,86
	3	Jawa Timur	12,87
	4	Maluku	5,75
	5	Sulawesi Utara	1,75
Sorong	1	Papua	29,60
	2	Sulawesi Selatan	9,62
	3	Jawa Timur	9,15
	4	Sulawesi Utara	8,82
	5	Maluku	8,50

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk (SP) dan Long Form Sensus Penduduk

Lampiran 2.2 Lima Besar Provinsi Tujuan Migran Seumur Hidup Menurut Kabupaten/Kota, 2022 (lanjutan)

Tempat Lahir	Urutan	Provinsi Tujuan	Persentase Jumlah Migran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Raja Ampat	1	Papua	40,44
	2	Maluku	9,49
	3	Sulawesi Selatan	9,12
	4	DI Yogyakarta	7,52
	5	Sulawesi Tengah	6,04
Tambrau	1	Sulawesi Selatan	51,12
	2	Jawa Timur	20,26
	3	Papua	9,29
	4	Jawa Barat	6,88
	5	Sulawesi Utara	3,53
Maybrat	1	Papua	91,44
	2	DI Yogyakarta	8,08
	3	Sulawesi Selatan	0,48
	4	Aceh	~0,00
	5	Sumatera Utara	~0,00
Manokwari Selatan	1	Papua	45,12
	2	Jawa Timur	12,63
	3	Sulawesi Utara	11,28
	4	Sulawesi Selatan	9,43
	5	Bali	6,90
Pegunungan Arfak	1	Papua	39,64
	2	Aceh	19,53
	3	Kalimantan Tengah	17,16
	4	Maluku	10,65
	5	Jawa Tengah	6,51
Kota Sorong	1	Papua	42,75
	2	Sulawesi Tenggara	9,42
	3	Maluku	8,59
	4	Sulawesi Selatan	6,38
	5	Jawa Tengah	5,15

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk (SP) dan Long Form Sensus Penduduk

Lampiran 2.3 Lima Besar Provinsi Asal Migran Risen Menurut Kabupaten/Kota, 2022

Tempat Tinggal Sekarang	Urutan	Provinsi Tempat Lahir	Persentase Jumlah Migran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Fakfak	1	Maluku	28,09
	2	Papua	14,39
	3	Sulawesi Tenggara	12,83
	4	Nusa Tenggara Timur	8,80
	5	Sulawesi Tenggara	8,66
Kaimana	1	Maluku	26,00
	2	Sulawesi Selatan	17,58
	3	Papua	16,53
	4	Jawa Timur	9,51
	5	Sulawesi Tenggara	5,58
Teluk Wondama	1	Papua	27,08
	2	Sulawesi Selatan	25,66
	3	Sulawesi Tenggara	16,35
	4	Maluku	5,55
	5	Nusa Tenggara Timur	5,43
Teluk Bintuni	1	Sulawesi Selatan	34,16
	2	Papua	10,41
	3	Jawa Timur	7,82
	4	Maluku	7,82
	5	Sulawesi Tenggara	6,56
Manokwari	1	Sulawesi Selatan	22,41
	2	Papua	20,73
	3	Jawa Timur	14,14
	4	Sulawesi Tenggara	7,43
	5	Jawa Tengah	6,40
Sorong Selatan	1	Sulawesi Selatan	25,67
	2	Papua	17,84
	3	Jawa Timur	8,11
	4	Maluku	6,87
	5	Jawa Tengah	6,49
Sorong	1	Maluku	18,05
	2	Jawa Timur	10,61
	3	Maluku Utara	9,88
	4	Nusa Tenggara Timur	9,25
	5	Papua	9,05

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk (SP) dan Long Form Sensus Penduduk

Lampiran 2.3 Lima Besar Provinsi Asal Migran Risen Menurut Kabupaten/Kota, 2022 (lanjutan)

Tempat Tinggal Sekarang	Urutan	Provinsi Tempat Lahir	Persentase Jumlah Migran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Raja Ampat	1	Sulawesi Tenggara	25,89
	2	Papua	13,96
	3	Sulawesi Selatan	13,49
	4	Maluku	12,40
	5	Maluku Utara	9,63
Tambrau	1	Papua	35,85
	2	Maluku	11,76
	3	Sulawesi Tenggara	10,64
	4	Sulawesi Utara	9,52
	5	Jawa Timur	7,28
Maybrat	1	Papua	55,51
	2	Jawa Timur	7,09
	3	Sulawesi Utara	7,00
	4	Nusa Tenggara Timur	6,52
	5	Maluku	5,18
Manokwari Selatan	1	Papua	25,84
	2	Sulawesi Selatan	14,07
	3	Sulawesi Tenggara	13,28
	4	Jawa Timur	12,75
	5	Jawa Tengah	6,97
Pegunungan Arfak	1	Sulawesi Selatan	40,16
	2	Sumatera Utara	22,95
	3	Sumatera Selatan	12,30
	4	Jawa Timur	8,20
	5	Sulawesi Utara	8,20
Kota Sorong	1	Maluku	18,54
	2	Sulawesi Selatan	17,91
	3	Papua	13,11
	4	Jawa Timur	10,60
	5	Nusa Tenggara Timur	7,10

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk (SP) dan Long Form Sensus Penduduk

Lampiran 2.4 Lima Besar Provinsi Tujuan Migran Risen Menurut Kabupaten/Kota, 2022

Tempat Lahir	Urutan	Provinsi Tujuan	Persentase Jumlah Migran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Fakfak	1	Sulawesi Tenggara	28,84
	2	Maluku	24,96
	3	Sulawesi Selatan	10,89
	4	Jawa Timur	10,03
	5	Nusa Tenggara Timur	6,76
Kaimana	1	Sulawesi Tenggara	23,38
	2	Maluku	21,64
	3	Sulawesi Selatan	15,32
	4	Papua	8,93
	5	Jawa Timur	6,83
Teluk Wondama	1	Sulawesi Tenggara	66,51
	2	Nusa Tenggara Timur	10,85
	3	Jawa Tengah	8,45
	4	DI Yogyakarta	4,78
	5	Sulawesi Selatan	4,31
Teluk Bintuni	1	Sulawesi Selatan	29,28
	2	Jawa Tengah	16,58
	3	Jawa Barat	15,12
	4	Sulawesi Tenggara	15,07
	5	Jawa Timur	14,53
Manokwari	1	Jawa Timur	17,05
	2	Sulawesi Tenggara	15,24
	3	Papua	12,13
	4	Sulawesi Selatan	11,95
	5	Jawa Tengah	8,90
Sorong Selatan	1	Sulawesi Selatan	33,29
	2	Jawa Timur	27,98
	3	Sulawesi Tenggara	13,22
	4	Sumatera Barat	6,26
	5	Papua	5,31
Sorong	1	Sulawesi Selatan	17,08
	2	Sulawesi Tenggara	15,54
	3	Jawa Timur	13,75
	4	Maluku	11,00
	5	Sulawesi Utara	8,69

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk (SP) dan Long Form Sensus Penduduk

Lampiran 2.4 Lima Besar Provinsi Tujuan Migran Risen Menurut Kabupaten/Kota, 2022 (lanjutan)

Tempat Lahir	Urutan	Provinsi Tujuan	Persentase Jumlah Migran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Raja Ampat	1	Sulawesi Tenggara	51,53
	2	Jawa Tengah	18,82
	3	Sulawesi Selatan	9,18
	4	Maluku	5,65
	5	Maluku Utara	4,00
Tambrauw	1	Sulawesi Selatan	69,18
	2	Nusa Tenggara Barat	6,82
	3	Jawa Timur	6,59
	4	Sulawesi Tenggara	4,94
	5	DI Yogyakarta	4,24
Maybrat	1	Papua	45,54
	2	Nusa Tenggara Timur	27,72
	3	DI Yogyakarta	17,82
	4	Sulawesi Uatar	7,92
	5	Lainnya	~0,00
Manokwari Selatan	1	Jawa Tengah	63,08
	2	Sulawesi Tenggara	25,38
	3	Sulawesi Selatan	10,77
	4	Lainnya	~0,00
	5	-	-
Pegunungan Arfak	1	Maluku	32,77
	2	Papua	20,17
	3	Sulawesi Tenggara	19,33
	4	Sulawesi Utara	15,97
	5	Jawa Tengah	9,24
Kota Sorong	1	Sulawesi Tenggara	30,69
	2	Maluku	13,35
	3	Papua	8,87
	4	Sulawesi Selatan	7,45
	5	Jawa Timur	7,08

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk (SP) dan Long Form Sensus Penduduk

ST 2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

DATA
MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA BARAT**

Jl. Raya Trikora Sowi IV No.99, Manokwari
Telp : (0986) 2210054
Homepage : <http://papuabarat.bps.go.id>
E-mail : bps9100@bps.go.id